KATA PENGANTAR:
Alue Dohong
Setia Budhi

KARYA TERPILIH
LIPI
PROGRAM AKUISISI
PENGETAHUAN LOKAL
2021
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Nasrullah

GERAKAN LAUNG BAHENDA

Militansi Orang Dayak Bakumpai Mempertahankan Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan



Buku ini tidak diperjualbelikan.

GERAKAN LAUNG BAHENDA

Militansi Orang Dayak Bakumpai Menjaga Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR:
Alue Dohong
Setia Budhi, Ph.D.

GERAKAN LAUNG BAHENDA

Militansi Orang Dayak Bakumpai Menjaga Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan

Nasrullah

Editor: Dr. Desy Mardhiah, S.Th.I., M.Si.



PENERBIT & PERCETAKAN
ARTI BUMI INTARAN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

GERAKAN LAUNG BAHENDA
Militansi Orang Dayak Bakumpai Menjaga Lahan Gambut
dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan

Penulis:
Nasrullah

Kata Pengantar
Alue Dohong
Setia Budhi, Ph.D

Editor: Dr. Desy Mardhiah, S.Th.I., M.Si
Desain isi dan sampul : MN. Jihad

Diterbitkan oleh:
ARTI BUMI INTARAN (ANGGOTA IKAPI)
Mangkuyudan MJ III/216 Yogyakarta
e-mail: artibumiintaran@gmail.com

Dimensi: xxiv + 106 hlm, 23 cm
ISBN: 978-602-5963-80-3

Dicetak oleh:
CV. Arti Bumi Intaran
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

MOTTO

"Petak danum akan anak ensu"

Buku ini dipersembahkan kepada
Warga desa Jambu Baru yang militan dan kompak
menjaga petak danum

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

TESTIMONI

"Buku ini memberikan pengetahuan baru tentang salah satu sub etnis Dayak, yaitu Dayak Bakumpai yang memang masih relatif langka. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa yang renyah ini juga memperlihatkan bahwa perjuangan yang gigih tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi sebagai seorang antropolog, gaya penulisan etnografi sangat terasa pada beberapa bab buku ini"

(**Alfisyah, S.Ag., M.Hum., M.Pd**, *Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP, ULM*)

"Sebagai akademisi hukum yang juga konsen dengan kajian lingkungan hidup, saya mengapresiasi lahirnya buku ini tentu tak lepas dari kepekaan penulis maka buku ini adalah karya intelektual yang cukup baik di tengah ketimpangan masalah sosial atau fenomena konflik sosial yang kerap melanda masyarakat strata bawah yang berhadapan pada kelas sosial tertentu. Buku ini betul-betul sebagai wadah modal sosial dan singkat cerita buku ini layak serta menarik untuk dibaca oleh semua elemen."

(**Daddy Fahmanadie S.H,LL.M**, *alumni pasca sarjana Fakultas Hukum UGM dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum ULM*).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

"Kajian Pak Nas sebagai seorang intelektual Dayak mengalir nyaman dengan bahasa santun melukiskan sebuah *lewu* Dayak dengan historisitas, keunikan dan keunggulannya sekaligus tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam perubahan zaman. Buku ini mengajak kita untuk arif dan *bahadat* memposisikan alam sebagai identitas sosial budaya, sumber inspirasi dan sumber ekonomi warga lokal. Pada saat yang sama buku ini mendorong warga masyarakat berani bersuara (proaktif Gerakan Laung Bahenda) melawan ketidakadilan sosial ekologis yang kerapkali terjadi di sekitar kita."

(**Dr Kinurung Maleh, M.Th**, *Akademisi dan Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kalimantan Selatan*).

"Buku ini sangat bagus untuk dijadikan salah satu bahan bacaan dan salah satu referensi strategi gerakan dan perjuangan dalam membela hak-hak masyarakat. Saya apresiasi apa yang sudah penulis kerjakan. Hak-hak masyarakat harus diperjuangkan, tidak bisa hanya sekedar menunggu apalagi kalau terkait konflik dengan investasi yang rakus dan serakah akan lahan. Seperti kita ketahui semua bahwa salah satu menuju kesejahteraan rakyat, rakyat perlu tanah. Untuk itu jangan sampai ada rakyat di negeri ini yang tidak memiliki tanah. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih dan salut terhadap penulis dan warga masyarakat dalam "Gerakan Laung Bahenda" yang berjuang demi lingkungan dan mempertahankan lahan/tanah nya dari ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Semoga perjuangan yang dilakukan dapat menjadi semangat semua orang dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa."

(**Kisworo Dwi Cahyono**, *Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan*)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

"Membaca buku ini seperti menikmati paparan kesaksian seorang intelektual tentang kecintaan pada kehidupan bermartabat yang layak diperjuangkan. Perjuangan tiada akhir. Ditulis dengan mengalir dan santai membuat buku ini layak dibaca oleh mahasiswa maupun khalayak umum"

(**Dr. Sukapti, M.Hum**, *Antropolog dengan judul disertasi "Di Bawah Payung Kemitraan: Perangkap Perkebunan Sawit dan Siasat Pekebun", Dosen Prodi Pembangunan Sosial, Fisip, Unmul*).

"Kehadiran sebuah buku bukan hanya sebagai karya akademik, tetapi ia hadir sekaligus sebagai warisan peradaban. Buku karya saudara Nasrullah ini memotret episode peradaban dinamis dan progresif dari sub etnis Dayak Kalimantan (Bakumpai), sebuah perlawanan cerdas, bergerak dengan simbol kultural Laung Bahenda. Simbol perlawanan dan kehendak kolektif akar rumput, rasa satu desa (*ije lebu*) dan satu kesamaan etnis (*uluh itah*) untuk menolak kuasa yang rusak lingkungan desa. Menariknya saudara Nasrullah tidak hanya menulis sebagai akademisi, tapi ia juga terlibat dalam gerakan tersebut, karenanya pantas disebut intelektual. Sebab intelektual itu mereka yang melibatkan diri dalam perjuangan, dalam urusan kepentingan orang banyak. Buku ini layak dan patut dibaca oleh siapapun, apalagi bagi mereka yang *concern* dengan isu *social advocation* dan *new social movement*"

(**Ubedilah Badrun**, *Analis Sosial Politik UNJ dan Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia/APPSANTI*)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Alue Dohong

Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Nasrullah penulis buku *Gerakan Laung Bahenda* yang menggambarkan secara gamblang perjuangan masyarakat Dayak Bakumpai Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam mempertahankan aset ekonomi dan tradisi pengelolaan hutan rawa gambut-nya dari gempuran korporasi berbasis usaha pertanian monokultur yang cenderung menegasi, abai dan kurang respek terhadap eksistensi masyarakat adat beserta dengan nilai-nilai tradisi dan kearifan yang mereka anut, khususnya di dalam mengelola sumber daya alam rawa gambut secara bijaksana dan berkelanjutan.

Saudara Nasrullah yang juga seorang akademikus tidak saja menarasikan gerakan masyarakat adatnya dari luar melainkan juga yang bersangkutan melibatkan diri secara langsung dalam gerakan tersebut, sehingga distorsi dan bias informasi bisa dihindari dan roh gerakan warga masyarakat adat ter-representasi kental di dalam tulisannya.

Karena itu, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menghantarkan buku ini, bukan karena saya memberikan pembenaran dan berdiri pada salah satu pihak, melainkan karena saya sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dialogis,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

saling respek dan keterbukaan di dalam menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya hutan rawa gambut sehingga ekosistem unik-nan-rentan ini dapat dipastikan keberlanjutan fungsi dan nilainya di kemudian hari. Di samping itu, nilai tradisi dan kearifan adat harus diberi ruang dan mendapat tempat yang semestinya untuk berkontribusi di dalam praktik pengelolaan sumber daya rawa gambut secara berkelanjutan dan bijaksana di Indonesia.

Gerakan Laung Bahenda merupakan gerakan sosial, moral dan budaya dari masyarakat Dayak Bakumpai Desa Jambu Baru yang mengedepankan prinsip komunikasi dan dialogis sejajar serta menghindari cara-cara anarkis dan destruktif dalam menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya rawa gambut. Gerakan Laung Bahenda merupakan gerakan "*belum baadat*" atau "*belum bahadat*", yang menempatkan nilai-nilai dan praktik tradisi serta kearifan lokal masyarakat adat di dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam rawa gambut secara bijaksana dan berkelanjutan. Budaya dan nilai tradisi tersebut seyogianya harus dihormati, ditaati dan diberi ruang oleh pihak eksternal yang akan bersentuhan dan masuk di lingkungan komunitas adat. Gerakan Laung Bahenda mengindikasikan bahwa masyarakat adat tidak hanya ingin "*being heard*" akan tetapi juga "*being respected*" atas tradisi dan cara hidup yang mereka lakoni dan praktikkan selama ini. Mereka tidak ingin janji "hidup sejahtera" yang diintroduksi dan dijanjikan pihak luar via pertanian skala industri monokultur dan agak kurang ramah terhadap alam dipaksakan kepada mereka. Masyarakat Adat berhak untuk membentengi diri terhadap upaya-upaya pemberangusan atas budaya dan praktik kearifan tradisional mereka dalam mengelola hutan rawa gambut.

Memaknai Gerakan Laung Bahenda tersebut, saya menilai paling tidak ada tiga nilai pokok yang ingin diperlihatkan oleh Suku

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dayak Bakumpai Desa Jambu Baru yang perlu diketahui, dimaknai dan diapresiasi oleh pihak eksternal (korporasi) khususnya, yaitu:

Pertama, mempertahankan keberlakuan prinsip *ekologi* di dalam mengelola sumberdaya alam rawa gambut. Pengelolaan rawa gambut yang menerapkan prinsip pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) selama ini memang terbukti sejalan dan selaras dengan prinsip dan nilai keberlanjutan (*sustainability*) pengelolaan sumber daya rawa gambut. Sementara itu, sudah jamak fakta ilmiah memperlihatkan bahwa introduksi perkebunan sawit skala besar telah menimbulkan dampak terhadap ekosistem rawa gambut berupa laju deforestasi, penurunan keragaman hayati, peningkatan laju emisi gas karbon dioksida (CO_2) akibat devegetasi dan oksidasi gambut akibat drainase berlebihan, dan penguasaan aset lahan masyarakat secara tidak prosedural.

Kedua, prinsip berkelanjutan nilai ekonomi ekosistem rawa gambut melalui pengelolaan dan pemanfaatan multi-aspek jasa lingkungan secara bijaksana dan hati-hati guna menjamin keadilan antar generasi (masa kini dan yang akan datang). Bagi masyarakat tradisional seperti Desa Jambu Baru fungsi hutan rawa gambut tidak saja dilihat sebagai aset ekonomi dengan nilai terbatas jangka pendek melainkan nilai ekonomi (pendapatan dari multi-aktivitas seperti *mamurun*, *menggalam* dan *malauk*) dan nilai jasa ekosistem (keterjaminan ketersediaan jasa lingkungan seperti air, udara, biodiversitas) dan sosial budaya (sistem kultur bertani dan perikanan) yang menjadi identitas utama sistem budidaya kehutanan, pertanian dan perikanan yang dipraktikkan secara turun temurun sejak jaman dahulu kala, kini dan masa yang akan datang.

Ketiga, mempertahankan identitas dan eksistensi pranata dan nilai tradisi serta praktik adat dalam pengelolaan sumber

Buku ini tidak diperjualbelikan.

daya rawa gambut yang diyakini berada di jalur yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai komunal dari pada menerima tawaran pengelolaan eksternal berbasis monokultur yang cenderung eksploitasi, kurang ramah rawa gambut dan berjangka pendek serta menegasi nilai-nilai sosio-ekologis masyarakat adat lokal.

Pembelajaran dari Desa Jambu Baru saya harapkan dapat menjadi bahan reflektif dan inspiratif bagi komunitas adat lain di Indonesia yang meyakini bahwa nilai tradisi dan kearifan lokal mereka dapat berkontribusi nyata bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam khususnya rawa gambut.

Jakarta, 09 Maret 2020

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

LAUNG BAHENDA

Setia Budhi, Ph.D.
Antropolog Universitas Lambung Mangkurat

Pada mulanya adalah sebuah kegelisahan yang datang bertahun-tahun dialami konstruksi akar rumput di sebuah kampung tepi sungai Barito. Kampung itu dikenali sebagai Jambu Baru Kecamatan Kuripan. Sebenarnya tidak terlampau sukar untuk menemukan kampung ini yang berpenduduk etnik Dayak Bakumpai. Kampung yang terbuka dari sisi sungai maupun jika jarak dibentang lurus dari arah daratan landai kaki Meratus.

Bertahun-tahun kampung ini hidup tenang dengan kehidupan warganya sebagai petani, menyadap karet, rotan dan sebagian adalah nelayan tangkap perairan lahan basah air tawar. Warga kampung ini telah terbiasa dengan krisis ekonomi dan hampir pasti dapat melalui krisis dengan baik. Musim hujan mereka bertani padi di keluarga, tiba musim kemarau mereka panen ikan di beje-beje yang masih terpelihara dengan baik. Antara musim hujan dan kemarau mereka terbiasa dengan menganyam tikar purun dan rotan. Melempar jala di sungai Barito ketika paceklik.

Adapun kampung tetangga telah lama tersiar kabar masuknya perkebunan Kelapa Sawit. Informasi itu bukan tidak sampai ke

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sampai ke telinga tokoh dan Kepala Desa Jambu-Baru, bahkan beberapa tetuha kampung, pengurus Masjid, ketua RT serta *Pambakal* pun secara langsung atau tidak langsung ditawarkan bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit tersebut. Tetapi semacam kesepakatan bersama di antara mereka untuk menolak setiap datangnya tawaran yang menggiurkan itu.

Terhadap penolakan para tokoh untuk masuknya perkebunan kelapa sawit, mereka dicap sebagai "tidak mengerti arti pembangunan". "*Pejabat terpenting di Ibukota dengan terang mengatakan kalau masyarakat tidak mau kebun Kelapa Sawit, berarti menyerahkan nasib saja mewariskan kemiskinan*"

Rupanya pihak perusahaan yang kemudian kita sebut sebagai korporasi tidak juga mau menyerah. Berbagai strategi pun dilakukan, mulia dari terus merayu warga sebagai karyawan, sampai kemudian menambah areal kebun secara diam-diam. Maka tidak mengherankan kalau beberapa desa terlihat jarak desa mereka dengan batas kebun hanya ratusan meter dari serambi rumah mereka.

Mengapa warga Desa Jambu Baru menolak sawit, ini bukan tiada alasan, sebab sejumlah pemuda desa ini sering bepergian ke wilayah lain dan melihat sendiri bagaimana nasib petani kebun sawit, mereka dapat membandingkan bagaimana kehidupan sebelum dan sesudah kedatangan perkebunan dan mereka mendiskusikan "temuan" itu dengan keluarga dan penduduk kampung halamannya. Maka tidak mengherankan kalau "rapat desa" yang dilakukan secara informal misalnya di teras rumah, ketika waktu menunggu shalat atau waktu pulang kerja dari sawah membincangkan dilema sawit, sebagai topik perbincangan yang selalu menghangatkan suasana warganya.

Hari itu pun tiba, kabar perihal luasan kebun sawit milik korporasi sudah hampir menyentuh garis batas terluar Desa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jambu Baru. Hal itu tentu saja cepat menimbun reaksi anggota warga desa, tokoh masyarakat bahkan Kepala Desa yang tadinya perlu bersikap netral harus mengambil sikap, ini kemudian masalah bersama.

Ulang alik tokoh pemuda memberikan semangat dan memberi simpul untuk sikap menolak keras perusahaan yang sebentar lagi seperti mengeksekusi lahan warga atas nama Ijin Hak Guna Usaha – HGU. Beberapa kali telah "pecah" perseteruan antar warga dengan karyawan perusahaan dan beberapa itu pula seteru dapat diredam sendiri warga. Memang ada warga dengan sikap garis keras tetapi juga warga yang ingin mengambil jalan tengah sebagai solusi. Belakangan diketahui bahwa ketika jalan tengah tidak dapat dilakukan, maka jalan lain muncul sebagai satu alternatif yang kemudian dikenal dengan Gerakan Laung Bahenda, sebuah proses pengorganisasian bagi para warga dan aktivis guna pencapaian komponen-komponen menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit.

Apabila ditelusuri lebuh jauh, gerakan Laung Bahenda tidak jauh berbeda dengan semakin meluasnya antiglobalisasi. Tahun 2000-an, gerakan ini semakin besar dan terbuka dalam mengorganisir massa pendukung dengan kampanye luas untuk aksi-aksi langsung dan pembangkangan sipil. Model pengorganisiran seperti ini, kadang-kadang di bawah jaringan masyarakat global yang berusaha menyatukan berbagai kasus berbeda untuk bergabung bersama dalam satu perjuangan global. Pada pertemuan-pertemuan korporasi, tujuan yang dinyatakan oleh kebanyakan gerakan adalah untuk menghentikan cara-cara bekerja korporasi. Walaupun demonstrasi jarang sekali berhasil lebih dari menunda atau mengganggu pertemuan-pertemuan itu, hal ini memotivasi mobilisasi dan memberikan mereka sebuah pandangan tujuan jangka pendek.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengunjuk rasa mengatur diri mereka sendiri dalam "kelompok kecil" (*affinity groups*), dengan ciri khas sebagai kelompok-kelompok tanpa hierarki dengan orang-orang dekat. Kelompok-kelompok kecil ini kemudian akan mengirimkan wakilnya ke pertemuan perencanaan. Sebagai contoh, di Praha sepanjang protes anti IMF dan World Bank pada September 2000, pengunjuk rasa memecah menjadi tiga kelompok yang terpisah, mendekat pusat konferensi dari tiga penjuru: satu dengan berbagai bentuk pembangkangan sipil (pawai gerakan Kuning), satu (pawai gerakan Pink/Silver) dengan "*tactical frivolity*" (kostum, tarian, teater, musik, dan seni) dan satu lagi gerakan Biru (wiki/Gerakan_ antiglobalisasi, 2020).

Anthony Giddens (2006) menyebut gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan, berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.

Dalam gerakan Laung Behenda, "rapat desa" untuk mendiagnosis suatu kondisi sosial yang bermasalah untuk dipecahkan, menawarkan jalan keluar alasan pembenaran untuk memotivasi dukungan bagi aksi kolektif. Ia berhubungan dengan proses memfasilitasi kemunculan semangat melawan. Simbolik melalui Laung Bahenda, mengorganisasi dan bertindak pada basis kesadaran yang berkembang atas ketidakabsahan dan kerentanan sistem kontrol sosial tentang masifnya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di desa Jambu Baru, Kabupaten Barito Kuala.

Kampus ULM, 9 Maret 2020

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Buku ini hadir karena dua hal. *Pertama*, keterlibatan penulis dalam gerakan Laung Bahenda yang disebabkan karena dua hal pula. Pertama, penulis sampai sekarang berKTP, lahir dan dibesarkan desa Jambu Baru. Jadi penulis adalah *uluh lebu hite kia* (orang kampung itu juga). Kedua, sebagai akademisi penulis merasa harus turun ke dunia praktis, sebab pengalaman penulis dalam riset konflik antara warga dengan pihak perkebunan kelapa sawit telah mendapatkan temuan adanya korban harta benda bahkan fisik manusia. Penulis tidak ingin konflik warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di desa penulis akan berujung pada tindakan destruktif, penahanan, ancaman fisik, berdampak hukum dan hal-hal merugikan lain.

Kedua, dari keterlibatan penulis itulah, data yang penulis miliki cukup banyak baik dari pengalaman pribadi meliputi keterlibatan penulis bersama warga mendiskusikan, menyusun tuntutan hingga ke wakil rakyat sebagai observasi partisipan bahkan auto-etnografi. Atas dasar itulah, penulis membuat sebuah laporan penelitian yang didanai PNBP dari FKIP ULM dan penulis berketetapan hati bahwa hasil penelitian ini harus jadi buku agar dapat dinikmati kalangan masyarakat umum.

Proses penulisan buku ini dimatangkan di kota Padang, padahal saya mengirimkan surat izin kepada pimpinan fakultas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk keperluan keluarga tetapi juga saya gunakan untuk kepentingan ini. Demikianlah sebenarnya, saya menikmati masa jeda mengajar bersama istri saya tercinta Desy Mardhiah. Di kamar tidur yang juga kamar belajar penuh jejeran buku, di situlah sedikit demi sedikit buku ini dirampungkan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada kolega di prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Bu Sigit, Bu Alfis, Pak Yusuf, Bro Syahlan, Pa Lumban, Bu Yuli, Bu Laila, Bu Rizki, Pa Rahmat dan Bu Cucu segala keceriaan kita semua dalam menjalani rutinitas kegiatan akademisi yang kemudian melahirkan berbagai kegiatan penelitian termasuk berbuah buku ini. Kepada karibku Marahalim Siagian, terima kasih karena telah kupaksa mengoreksi cepat buku ini.

Saya berterima kasih banyak kepada kawan-kawan jurnalis dari Marabahan dan Banjarmasin yang meliput gerakan Laung Bahenda secara proporsional yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan ekologi. Kata-kata Napoleon Bonaparte masih terngiang nyaring “ujung pena lebih tajam dari mata pedang”.

Tepi Sungai Barito, Maret 2020

Nasrullah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

Motto — v
Testimoni — vii
Kata Pengantar Alue Dohong — xi
Kata Pengantar Setia Budhi, Ph.D. — xv
Pengantar Penulis — xix
Daftar Isi — xxi
Daftar Tabel — xxii
Daftar Gambar — xxiii

Bab 1 Kegembiraan di Malam Tahun Baru — 1
Bab 2 Sawit, Oh Sawit — 5
Bab 3 Dilema Perkebunan Sawit — 13
Bab 4 Nasib Setangkai Padi dan Purun — 23
Bab 5 Menjaga Benteng Terakhir Lahan Gambut — 31
Bab 6 Menolak Sejak Dulu — 41
Bab 7 Tamu Tak Diundang — 47
Bab 8 Aksi Pencegahan — 53
Bab 9 Gerakan Laung Bahenda — 59
Bab 10 Dialog dan Debat — 65
Bab 11 Belum Baadat — 95

Daftar Pustaka — 99
Biodata Penulis — 105

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perusahan Besar Swasta di Kabupaten Batola — 18

Tabel 2 Surat Menyurat Perusahaan Perkebunan Sawit dan Camat Kuripan Kepada Kades Desa Jambu Baru — 36

Tabel 3 Biaya Tali Asih Lahan — 38

Tabel 4 Liputan Berita Gerakan Laung Bahenda — 65

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR GAMBAR

Foto 1 Warga Berlaung Bahenda Bersiap Menuju Gedung DPRD Batola — 10

Foto 2 Lambang Kabupaten Batola — 17

Foto 3 Lokasi Jambu Baru yang Digarap PT TAL — 20

Foto 4 Peta Jambu Baru dan Sekitarnya di masa lalu — 22

Foto 5 Nama-nama Daerah Padang — 24

Foto 6 Larangan Mengeksploitasi Ikan — 25

Foto 7 Kawasan yang Diduga Diserobot PT TAL Dilihat Dari Google Map — 26

Foto 8 Blok Lahan Berdasarkan Angka akan Digarap Perusahaan Sawit — 27

Foto 9 Menolak Sawit Sejak 2007 — 31

Foto 10 Lahan PT CPKA, PT TBM, PT PAs — 34

Foto 11 Menuju Ruang Pertemuan DPRD Batola — 40

Foto 12 Kain Kuning di Pohon Tepi Sungai Barito — 43

Foto 13 Ibu-ibu Berpartisipasi Membuat Laung Bahenda — 44

Foto 14 Kepala Desa Jambu Baru Menyampaikan Maksud Warga untuk Berdialog Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Batola — 47

Foto 15 Tim Dialog Laung Bahenda — 50

Foto 16 Berita Acara Musyawarah Desa — 52

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 17 Hikmatullah Ketua DPRD Batola Periode 2014-2019 Membuka Dialog — 54

Foto 18 Kesepakatan Warga dan Pihak perusahaan — 58

Foto 19 Basrin Anggota DPRD Batola Membacakan Kesepakatan Bersama — 59

Foto 20 Warga dan aparat Desa Selalu Rapat untuk Menyamakan Persepsi sebelum Berangkat Dialog — 61

Foto 21 Peserta Gerakan Laung Bahenda Diapit Dua Anggota DPRD Batola — 63

Foto 22 Wawancara Juru Dialog Laung Bahenda dengan Wartawan — 64

Foto 23 Peserta Laung Bahenda Bersama Wakil Bupati Batola di Halaman DPRD Batola — 66

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 1

KEGEMBIRAAN DI MALAM TAHUN BARU

Kisah *Panggalaman*

Sebuah desa di tepi sungai Barito, salah satu sungai terpanjang dan terlebar di Indonesia, beberapa jam menjelang pergantian tahun 2019 ke tahun 2020, terdengar riuh rendah tawa di antara percakapan warga menggunakan bahasa Bakumpai. Warga yang berkumpul di depan warung, sambil duduk di teras rumah atau bangku panjang di tepi jalan adalah generasi produktif yang berusia 30 hingga 45 tahun. Warung itu sendiri terletak di *bentuk lebu* (pertengahan kampung) yang berfungsi sebagai kegiatan jual beli dan juga pusat informasi karena penduduk dari hulu dan hilir desa sering berkumpul di tempat itu.

Penulis mencoba berbaur dan mendapati pembicaraan mereka tidak seperti sebelumnya yang sering debat kusir, belum selesai satu tema pembicaraan berpindah ke tema lain. Kali ini mereka berbicara tentang tema khusus. Agaknya kegembiraan di desa yang berjarak kurang lebih 130 Km dari kota Banjarmasin ibukota provinsi Kalimantan Selatan bukan karena riuh rendah perayaan tahun baru. Juga bukan karena sebaliknya, yakni tidak ada suara letupan petasan, hingar bingar musik dangdut, atau pun sebagaimana kebiasaan warga menunggu acara penting tengah malam dengan *barapian* (masak-masak) di tepi jalan. Bukan pula karena aliran listrik yang sering padam dan kini menyala terang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

atau sinyal telepon seluler dengan kapasitas 4G memancar kuat. Jauh dari hal-hal tersebut, sebab kebahagiaan sederhana mereka adalah kesuksesan membanting tulang dan memeras keringat mencari dan menebang pohon galam (*Melaleuca sp.*) di musim penghujan pada penghujung Desember 2019.

Warga yang sedang bercakap-cakap, rata-rata mereka sudah beristri dan tentu kebahagiaan mereka mendapatkan batang galam hasil tebangan dan dijual kepada pembeli yang sudah menunggu di muara anak sungai adalah kebahagiaan keluarga. Sebenarnya malam pergantian tahun baru merupakan perkara kebetulan saja, sementara kebahagiaan subyektif ditularkan kepada sesama warga menjadi pengalaman intersubyektif atau pengalaman komunal warga tetang pekerjaan mereka.

Riuh rendah warga membicarakan kerja mencari galam di areal kampung. Tersebutlah ukuran batang galam ditebang dengan sebutan lokal "*galam dag*", "*galam panjang uju*", "*galam panjang epat*" sebagai jenis galam tebangan yang rata-rata penghasilan per orang menjual galam setiap hari antara Rp 150 ribu sampai Rp 400 ribu, dengan durasi kerja dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kebahagiaan itu terjadi karena dua hal. Pertama, mereka mendapatkan penghasilan dari menjual batang galam yang ditebang. Setelah musim kemarau berganti musim hujan, di mana permukaan air cukup tinggi untuk mengapungkan jukung mereka hingga jauh ke dalam lokasi kerja, sehingga memungkinkan memilih dan mendapatkan galam yang berkualitas. Mereka mengatakan, diameter pohon galam yang ditebang tahun ini rata-rata lebih lebar dan lebih panjang dari tahun lalu. Begitulah, pohon galam tumbuh secara alami di lahan pasang surut yang dinamakan *padang* dan pertumbuhan pohon galam sangat cepat sehingga memungkinkan ditebang setiap tahun. Selain itu dari durasi waktu bekerja sekitar 6 sampai 8 jam per hari dan peralatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang digunakan masih gergaji berarti tidak melakukan penebangan habis. Apalagi galam yang mereka tebang hanya ukuran tertentu saja.

Setiap tahun warga menebang pohon galam untuk dijual yang biasanya digunakan untuk fondasi bangunan. Selain itu, pohon galam yang ditebang dapat dipotong-potong dengan ukuran tertentu kemudian dibelah menjadi kayu *babangkih* (kayu bakar). Kulit pohon galam yang sangat tebal juga dapat digunakan untuk atap rumah terutama untuk *hubung* atau bivak sebagai tempat tinggal sementara para petani di sawah.

Bukan Galam Terakhir

Kedua, sebagai bagian penting dari buku ini, kebahagiaan itu tidak terlepas dari pengakuan warga yang dipanggil Sangkar "*te jaka itah dada dumah kan dewan bianu tau ida kawa hindai manggilau galam*" (seandainya kita tidak menghadap dewan (DPRD Barito Kuala selanjutnya disebut Batola) tempo hari, mungkin kita tidak dapat lagi mencari galam). Beberapa bulan lalu, warga Jambu Baru mendatangi DPRD Batola melakukan audiensi, berdialog, adu argumen mengenai wilayah desa mereka yang diserobot salah satu perkebunan sawit. Warga menentang ekspansi perusahaan perkebunan sawit di wilayah mereka dan tetap bertahan dengan lingkungan *padang* sebagaimana adanya. Maka jika malam itu mereka berbahagia, bukan hanya sekedar karena mendapatkan galam tetapi bahagia karena lahan mereka tetap ada dan masih bisa produktif. Meskipun demikian, *padang* galam itu pun saat ini sangat terbatas, sebab desa lain telah dimasuki areal perkebunan sawit. Jadi mereka yang berbahagia pada malam pergantian tahun baru, di balik semua itu, ada ancaman mengintip karena sekitar tempat mereka telah dikepung areal perusahaan perkebunan sawit yang sewaktu-waktu dapat mengubah pekerjaan sehari-hari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi buruh atau karyawan perkebunan atau bahkan membuat mereka menjadi pengangguran.

Pergantian malam tahun baru bagi para *panggalaman* (orang yang mencari atau menebang pohon galam) tidak dilewati hingga puncak malam dan berganti tanggal dan tahun, mereka harus pulang ke rumah dan tidur untuk kembali bekerja besok pagi. Pun hanya berjarak sekitar 5 meter dari tempat berkumpul mereka, besok tempat ini akan riuh rendah. Mesin diesel yang memutar baling-baling menggerakkan tuas kayu dan mengungkit 5 buah alu secara bergantian. Alu itu dinaikkan oleh tenaga mekanis dan turun menghunjam berkat kekuatan gravitasi bumi, akan menumbuk batang tanaman purun (*Fimbristylis sp.*) yang disatukan dalam ikatan cukup untuk menganyam 3 lembar tikar.

Besok akan terdengar bunyi "dub-dab...dub-dab...dub-dab" suara mesin penumbuk purun ditingkahi keceriaan ibu-ibu di tengah gemuruh mesin. Pada saat bersamaan, sebagian warga desa baik pria dan perempuan berangkat ke padang. Mereka menebang pohon galam, mencari ikan, bahkan mengambil purun dari kebun. Semua itu sebagai tanda kehidupan bergantung sumber daya alam masih lestari. Warga harus mempertahan semua aset itu karena sewaktu-waktu lingkungan mereka dapat dikonversi oleh pihak korporasi dan secara jelas atau laten dapat didukung oleh negara.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB
2

SAWIT, OH SAWIT

Kisah Arus Bawah

Beberapa kajian tentang etnisitas atau masyarakat di suatu daerah seringkali berkaitan dengan kekalahan, bahkan sebuah buku *Senjatanya Orang-Orang Kalah* menunjukkan perlawanan petani cenderung melakukan teknik-teknik defensif yang dilakukan kaum tani yang terkepung (Scott, 2000, p. 43). Pemikiran Scott memberikan inspirasi perspektif kultural dalam analisis perlawanan kaum tani berbasis hutan (Maring, 2010, p. 26). Demikian pula dalam buku *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*" bahwa nilai atau nilai jual ke-Dayak-an adalah sesuatu yang relatif baru. Sebelum awal tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru memandang orang Dayak sebagai beban – mereka dianggap 'terbelakang' dan 'primitif', rendah nilainya bagi etika pembangunan (Maunati, 2006, p. 364). Pun dalam buku *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan* dinyatakan bahwa orang Meratus mudah ditempatkan dalam kondisi "dalam keadaan bahaya", mereka terancam kerusakan ekosistem dan tentara (Tsing, 1998, p. 432) yang sampai sekarang ancaman ekosistem Meratus terus berlangsung dan mendapat resistensi dengan adanya gerakan #savemeratus.

Kondisi marginal semakin ditegaskan dalam buku berjudul *Tempun Petak Nana Sare (Kisah Dayak Kadori, Komunitas Peladang di Pinggiran)* bahwa eksistensi Dayak Kadori semakin terpinggirkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan adanya perusahaan pemegang HPH yang membuat para peladang tersingkirkan (Rini, 2005). Agaknya narasi tersebut perlu digeser dengan narasi semangat perlawanan, misalnya Aliansi masyarakat Dayak Meratus dan Ornop-Ornop lingkungan se-Kalsel – berhasil memobilisasi dukungan nasional dan internasional untuk membatalkan rencana investasi maskapai tambang Kanada, Placer Dome di Kawasan Pegunungan Meratus (Aditjondro, 2003, pp. vii-viii). Perkembangan terakhir gugatan Walhi agar perusahaan tambang tidak beroperasi di kawasan Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, studi tentang gerakan sosial telah banyak dilakukan, seperti dampak perkebunan sawit dan menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat dapat ditemukan pada *Laporan 5 Daerah Rawan Konflik Provinsi Kalimantan Selatan* yang dilakukan pada tahun 2013. Kutipan dari laporan itu adalah:

> Untuk tetap beroperasi, PT KJW mendapat angin dengan adanya surat bupati Tanah Laut yang menganulir peta desa tahun 1992 dengan surat nomor 179 tahun 2010. Hal ini memicu keresahan warga. Merasa tidak puas dengan surat bupati tersebut, karena aktivitas perusahaan tetap beroperasi di lahan warga Tabanio, sehingga mereka secara bersama-sama melakukan demonstrasi ke DPRD Tanah Laut yang direspon DPRD untuk membuat pansus. Setelah pansus turun ke lapangan dengan memberikan rekomendasi bahwa PT KJW untuk menghentikan aktivitas sementara di daerah Tabanio dan batas desa hendaknya mengacu pada tahun 1992 (Peneliti, 2013, p. 60).

Di Kalimantan Tengah, melalui buku berjudul *Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia Potret Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah* menunjukkan bahwa praktik bisnis di sektor perkebunan sawit di wilayah Kalimantan Tengah membawa perubahan signifikan bagi kehidupan individu dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

komunitas. Keberadaan industri perkebunan kelapa sawit telah memperburuk kualitas hidup warga dan komunitas (Palupi, et al., 2015, p. 7)

Perlawanan warga dalam mempertahankan haknya dari perusahaan sawit juga terjadi di berbagai daerah. Sebuah artikel yang terbit di kolom opini harian Kompas berjudul *Pesan dari Sarapat* menceritakan bahwa:

> Sarapat adalah nama desa di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Meskipun statusnya sebuah desa di pedalaman, apa yang terjadi di Sarapat memberikan gambaran tentang bagaimana Republik ini dikelola.
>
> Beberapa tahun terakhir, masyarakat adat di desa Sarapat berjuang mempertahankan hak hidup berhadapan dengan korporasi tambang dan perkebunan sawit yang memorak-porandakan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat (Palupi, 2013, p. 7).

Dari artikel di atas dengan jelas dampak negatif dari perkebunan sawit dan pertambangan adalah "memorak-porandakan lingkungan" dan "kehidupan masyarakat adat". Padahal dua kerusakan itu adalah fondasi masyarakat desa dalam kehidupan dan filosofis hidup mereka. Dua kasus di atas telah menjadi penguat dari pandangan bahwa jika sering terjadi klaim antara perusahaan dan warga masyarakat pendukungnya di satu pihak, dan warga masyarakat lain yang didukung oleh organisasi masyarakat sipil misalnya, yang berkembang menjadi fenomena tak berkesudahan (Zakaria, 2018, p. 17). Dari sisi kasuistik, perlawanan atau gerakan sosial yang terjadi di Pulau Kalimantan umumnya merupakan resistensi warga terhadap ancaman pengambilalihan lahan oleh pihak korporasi.

> Hal berbeda dengan masalah buruh tani di Kecamatan Pandeglang memang berakar minimnya akses pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian. Dalam sektor pertanian, buruh tani terjepit dari banyaknya monopoli

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> pemilikan dan penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh penduduk dengan kelas sosial di atasnya, juga dari industri skala besar (Zakaria, 2018, p. 38).

Di Riau, baru saja diterbitkan laporan riset konflik sumber daya alam tahun 2019, berdasarkan pemberitaan media cetak dan media *online* hasilnya menunjukkan lebih banyak konflik dengan perusahaan sawit:

> Konflik lahan di provinsi Riau secara umum disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah hutan dan perkebunan.
>
> Namun lebih spesifik konflik berada pada sektor penyerobotan lahan. Pada tahun 2019 sub sektor konflik terbanyak adalah penyerobotan lahan kehutanan dan lahan milik masyarakat oleh perusahaan sawit. Dari total 51 kasus konflik, penyerobotan lahan menyumbang angka 25 kasus. Artinya kasus penyerobotan sebanyak 49 % dari total kasus konflik pada tahun 2019 (Peneliti, 2020, pp. 4-5).

Di Batola, Kalimantan Selatan sebagaimana tesis berjudul *Perubahan Sosial Budaya, Lingkungan Hidup serta Persepsi Masyarakat Sekitar Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Batola Propinsi Kalimantan Selatan. (Studi Kasus di Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan)* dijelaskan bahwa:

> Keberadaan perusahaan perkebunan sawit selain meningkatkan penghasilan warga, terutama bagi yang bekerja di perusahaan tersebut. Hanya saja yang dulunya mencari galam bisa dilakukan dekat rumah mereka, setelah masuknya perkebunan kelapa sawit tempat mencari galam menjadi lebih jauh dan operasionalnya juga lebih besar, sebab potensi galam dekat rumah mereka sudah berkurang jumlahnya. Secara lebih luas, dapat diprakirakan bahwa dampak perkebunan kelapa sawit akan mempengaruhi ketahanan pangan bagi wilayah tertentu. Hal ini didasarkan pada luas lahan pertanian yang mulai berkurang serta berkurangnya penggarap lahan tersebut. Selain itu, saat ini mulai muncul hama baru yang menyerang tanaman padi, padahal dulunya daerah ini tidak pernah mendapat serangan hama (Adenansi, 2014).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Catatan menarik bahwa gerakan sosial terutama resistensi masyarakat terhadap korporasi sawit – yang perlu digaris bawahi - adalah bukan terhadap tanaman sawit itu sendiri. Melainkan tindakan pihak perusahaan yang agresif dan ekspansif dalam memperluas lahan perkebunan. Sebab catatan penting dalam buku *Dalam Rengkuhan Diyang Panambi Aruh dan Peladang Loksado dalam Arus Perubahan* bahwa masuknya kelapa sawit di Loksado pada tahun 2010 melalui perantara dinas pertanian. Beberapa peladang yang telah menanam karet, kini sudah mulai mengganti tanaman karet mereka dengan sawit. Hal ini disebabkan tanaman kelapa sawit dirasakan lebih menguntungkan (Soehada, 2018, p. 215).

Meskipun demikian, agaknya perkebunan secara khusus sawit sering kali menimbulkan masalah. Padahal dalam buku *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* menampilkan catatan di masa lalu bahwa antara tembakau ladang dan ladang padi bersifat simbiotis, setidaknya bersifat netral. Di Jawa, hubungan perkebunan gula dan sawah bersifat komplementer. Di Deli, perkebunan tembakau dan perkebunan rakyat asli berjalan sejajar, keduanya tidak berintegrasi dalam satu ekosistem, tetapi terpisah menjadi dua ekosistem yang agak serupa jenisnya (Geertz, 2016, p. 130). Kenyataan di masa lalu ini, rupanya tidak berubah dengan temuan di masa sekarang dalam *Laporan Final Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat* disimpulkan bahwa kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit menciptakan konflik yang sangat intens dengan masyarakat. Hilangnya sebagian besar fungsi hutan akibat perluasan operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berdampak pada perubahan drastis jenis komoditas konsumsi di tingkat rumah tangga (Zakaria, et al., 2017, p. 97).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gerakan Sosial

Setiap perlawanan yang dilakukan suatu pihak selalu dalam rangka merespon kekuasaan dari pihak lain. Perlawanan itu sendiri merupakan wujud kekuasaan yang dilakukan untuk mempertahankan diri agar tetap eksis (Maring, 2010, p. 13). Namun istilah perlawanan ini cenderung menunjukkan pada tindakan reaktif jauh melebihi batas yang digariskan sekalipun perlawanan ini juga tidak berarti dilakukan secara frontal, melainkan juga dengan cara pasif, seperti diam, atau bekerja tidak sesuai instruksi, dapat juga dikatakan perlawanan. Para petani miskin melakukan perlawanan secara terus menerus dengan melakukan pembangkangan-pembangkangan kecil, seperti terlambat datang, menghilangkan peralatan, mencuri hasil panen, berpura-pura bodoh tidak dengan berbagai alasan seperti sakit, acara keluarga dan sebagainya (Sitoumorang, 2013, p. 79).

Perlawanan secara masif dan terkoordinir ini dapat dilihat sebagai gerakan sosial. Terdapat dua tipe gerakan sosial, yakni apakah gerakan itu pada dasarnya memulai suatu proses perubahan atau gerakan tersebut merupakan reaksi atas perubahan terjadi (Burke, 2011) jadi dua hal ini baik keinginan berubah atau keinginan tetap dipertahankan sama-sama berujung ada terjadinya gerakan sosial. Apa yang dilakukan petani miskin, merupakan gerakan sosial yang terjadi sebagai reaksi atas yang dikemukakan Scott, para petani terancam kehilangan tanah, keuntungan dan status sosial karena penetrasi modal besar yang masuk ke kampung-kampung (Sitoumorang, 2013, p. 80). Maka yang lazim disebut ialah gerakan sosial bertepi 'reaktif', terutama gerakan rakyat yang memprotes perubahan ekonomi atau sosial yang mengancam cara hidup yang berlaku (Burke, 2011, p. 135).

Bagian terpenting, untuk mengetahui apakah suatu gerakan tersebut bisa dikatakan sebagai gerakan sosial atau bukan yakni

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perlu dibedakan dari kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) – yakni suatu asosiasi yang dibentuk untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dengan cara menguntungkan para anggota-anggotanya (Suharko, 2006, p. 4). Dengan kata lain, mana kala gerakan tersebut berkaitan dengan keuntungan anggota tersebut semata-mata, tentu yang terlihat kuat adalah muatan kepentingan para pelaku gerakan, bukan pada kepentingan atau hajat hidup orang banyak. Oleh karena itulah, bagi Tarrow konsep gerakan sosial memiliki empat properti dasar yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif, memelihara politik perlawanan (Suharko, 2006, pp. 5-6).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB
3

DILEMA PERKEBUNAN SAWIT

Menolak Perkebunan Sawit

Jambu Baru hanya desa kecil di Kalimantan Selatan terletak di tepian sungai Barito yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kuripan Kabupaten Batola yang terletak paling utara atau paling hulu Kabupaten Batola. Secara geografis desa Jambu Baru berbatasan dengan : Sebelah utara berbatasan desa Balukung Kecamatan Bakumpai; Sebelah selatan berbatasan dengan desa Jambu Kecamatan Kuripan; Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin; sedangkan sebelah Barat desa Muara Pulau Kecamatan Tabukan.

Dari batas wilayah menunjukkan desa Jambu Baru berada di paling ujung Kecamatan, sebab hanya berbatasan dengan desa Jambu - oleh penduduk setempat disebut desa Hampelas - sebagai desa yang sama-sama berada dalam wilayah Kecamatan Kuripan. Batas wilayah utara, timur dan barat berbatasan dengan Kecamatan atau Kabupaten lain.

Adapun jarak dari dan menuju desa Jambu Baru ke ibukota Provinsi sekitar 130 Km, ke ibukota Kabupaten 45 Km, dan ke ibukota Kecamatan 25 Km. Seluruh akses tersebut hanya bisa dicapai melalui jalur sungai baik dengan *kelotok*, kapal motor, atau *speedboat*. Akses jalan darat menggunakan sepeda motor hanya bisa dilakukan pada musim kemarau saja dengan kondisi jalan yang bergelombang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perbandingan jumlah penduduk desa berjumlah 588 jiwa dan kepala keluarga sebanyak 195 pada tahun 2018 yang berarti tidak lebih banyak dari satu RT untuk daerah perkotaan. Secara kualitas penduduk desa ini ternyata mampu memberikan kejutan karena militansi warganya merupakan orang-orang Bakumpai, bagian dari suku bangsa Dayak Ngaju melakukan resistensi terhadap ekspansi perusahaan perkebunan sawit. Padahal desa-desa di sekitarnya yang didominasi orang-orang Bakumpai telah terlebih dahulu menyerahkan daerahnya bagi kepentingan perusahaan perkebunan sawit. Penolakan warga Jambu Baru bukanlah sebagai sebuah penyesalan, sebab mereka memiliki rasionalitas untuk mempertahankan daerahnya, terutama kawasan lahan gambut yang dinamakan *padang* (area yang ditumbuhi rerumputan, purun, pohon galam) agar tidak dijamah oleh ekspansi perkebunan sawit.

Bulan Juli hingga Agustus 2019, kehadiran warga desa Jambu Baru ke kantor DPRD Batola menarik perhatian publik terutama melalui media *online* yang meliput aksi mereka. Warga yang kompak mengenakan ikat kepala kuning disebut *Laung Bahenda* dalam jumlah terbatas tetapi memiliki militansi kuat membangkitkan perhatian publik karena dua hal. *Pertama*, masih ada warga di Kabupaten Batola yang secara tegas dan terang-terangan menolak ekspansi perusahaan perkebunan sawit dengan cara dialog serta berani berdebat di forum resmi wakil rakyat Batola. *Kedua*, gerakan Laung Bahenda membangkitkan sosial memori warga akan simbol bersama kain kuning digunakan sebagai penanda gerakan sosial. Bagian selanjutnya akan menjelaskan gerakan Laung Bahenda, tetapi terlebih dahulu akan melihat situasi sosial dan budaya secara lebih luas terutama Kabupaten Batola agar apa yang dilakukan warga bukan berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan secara luas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 1 Warga Berlaung Bahenda Bersiap Menuju Gedung DPRD Batola



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Daerah Terluas di Lahan Sempit

Wilayah Kabupaten Batola berdiri di atas lahan gambut, yakni lahan pasang surut, jika bukan untuk kawasan pertanian padi, nelayan pencari ikan di lahan rawa, *manetes* (mencari rotan), memanfaatkan purun sebagai bahan baku anyaman hingga penebangan pohon galam, selebihnya dianggap tidak memiliki potensi ekonomi atau keuntungan bagi daerah. Lain halnya jika dibandingkan kawasan Kabupaten lain yang isi buminya terkandung emas, intan, hingga tambang baru bara yang tentu saja dapat menjadi keuntungan bagi pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten lain yang tersebar di kawasan hulu ungai seperti Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong hingga daerah Kabupaten pesisir seperti Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Luas wilayah Kabupaten Batola adalah 2.996,96 km^2 yakni 7,99 persen dari luas provinsi Kalimantan Selatan, atau terluas keempat setelah Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru dan Kabupaten Banjar. Kabupaten Batola meliputi 17 Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Kuripan seluas yakni 343,5 km^2 (11,46%) dan Kecamatan Mandastana 339,0 km^2 (11,31%). Daerah yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Wanaraya dengan luasnya sebesar 37,50 km^2 (1,25%) (Anonim, 2019a, p. 3). Meskipun memiliki jumlah terluas, tetapi jumlah penduduk Kecamatan Kuripan berada pada nomor urut paling bawah yakni 5921 jiwa. Sementara desa terluas di Kecamatan Kuripan adalah Jambu Baru yakni 84,00 Km^2.

Namun luas lahan di Kecamatan Kuripan realitasnya adalah sempit jika dilihat dari pola kecamatan yang memanjang dari hulu ke hilir jika mengikuti alur sungai, sehingga lahan yang luas itu hanya tergambar dari akumulasi angka yang menyatakan satuan hektar saja. Sehingga membayangkan Kuripan seolah Tanah Genting Kra di Thailand yang diapit oleh lautan sedangkan Kuripan diapit oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara di bagian utara, Kecamatan Bakumpai di bagian selatan, Kabupaten Tapin di bagian timur, dan Sungai Barito yang memisahkan dengan Kalimantan tengah di bagian Barat.

Rupanya luas lahan yang dianggap tak tergarap seperti di kawasan Kecamatan Kuripan kecuali untuk berbagai aktivitas pekerjaan warga ternyata lambat laun dilirik oleh investor perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ada anggapan bahwa *padang* itu merupakan lahan yang tidak tergarap, selain itu, penduduk kecamatan Kuripan sendiri tidak membuka lahan persawahan di daerahnya. Mereka memilih lahan pertanian di daerah kecamatan Bakumpai di masa lalu, dan hingga sekarang di kecamatan Tabukan. Hal ini disebabkan, lahan yang ada mudah terendam di musim penghujan, sehingga bertanam padi selalu gagal. Maka sejak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sekitar tahun 2007, kawasan Batola perlahan tapi pasti mengalami konversi dari lahan pertanian dan lahan pekerjaan warga setempat menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit melalui kuasa usaha berbagai perusahaan.

Kejayaan, tapi di Masa Lalu

Kabupaten Batola pernah menyandang status sebagai daerah tertinggal karena banyak daerah yang terisolasi terutama sulitnya hubungan akses jalan darat, serta minimnya pendapat asli daerah non-pertanian. Meskipun sempat mengalami era keemasan di masa lalu, terutama ketika kota Marabahan di abad ke-14 menjadi bandar dagang besar kerajaan Banjar pra Islam, semacam World Trade Centre (WTC) pada masa lalu. Waktu itu, berbagai produk atau hasil alam dari hulu sungai Barito diperdagangkan di kota Marabahan yang terkenal sebagai kota perahu (Sjamsuddin, 2001). Di masa kemerdekaan, kota Marabahan menjadi urat nadi lalu lintas sungai dari wilayah Kalimantan Selatan terutama kota Banjarmasin yang terkoneksi ke kota-kota tepian di hulu sungai Barito yang merupakan wilayah Kalimantan Tengah seperti Buntok Kabupaten Barito Selatan, Muara Teweh ibukota Kabupaten Barito Utara dan Puruk Cahu ibukota Kabupaten Murung Raya sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Barito Utara.

Akses transportasi sungai ternyata bukan jaminan untuk mengangkat kemajuan Kabupaten Batola yang identik dengan pertanian, kemudian atas dasar itu, penduduk Batola semula didominasi suku bangsa Bakumpai dan suku bangsa Banjar menerima kedatangan suku bangsa lain melalui program pemerintah pusat yang bernama transmigrasi. Kaum transmigran dari pulau Jawa dan Bali sejak zaman Belanda telah menempati kawasan Tamban. Antara tahun 1937 dan 1939, di hutan berawa di pinggir anjir, 320 keluarga transmigran mendirikan Desa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Purwosari (Levang, 2003, p. 185), begitu pula di zaman kemerdekaan antara tahun 1969 dan 1973, hampir 5000 transmigran di lima desa kawasan Kecamatan Barambai (Levang, 2003, p. 175) yang berjarak sekitar 30 km dari kota Marabahan. Warga transmigran yang memiliki keterampilan bertani di dataran tinggi, harus belajar dari petani setempat untuk menaklukkan lahan pasang surut untuk diubah ke lahan pertanian.

Di masa keemasan era Orde Baru, sebenarnya Kabupaten Batola mengalami masa gemilang terutama kawasan berbatasan dengan kota Banjarmasin. Wilayah Kecamatan Tamban, Kecamatan Alalak, menjadi kawasan industri kayu lapis atau *plywood* level multi nasional, seperti Barito Pasifik Timber Group, Tanjung Selatan Makmur Jaya dan lain sebagainya yang mampu menyedot ribuan tenaga kerja sebagai karyawan yang tidak hanya dari warga Batola juga menyerap tenaga kerja dari daerah lain. Sayangnya era Orde Baru yang menganut paham sentralistis membuat perputaran ekonomi lebih banyak tertarik ke pemerintah pusat. Selain itu, kawasan Batola sebagai tempat operasional perusahaan tentu hanya menikmati terserapnya tenaga kerja, sedangkan kota Banjarmasin yang lebih dekat dengan kawasan tersebut justru diuntungkan karena menjadi tempat berbagai aktivitas warga terutama karyawan perusahaan untuk membelanjakan pendapatannya dibanding ke kota Marabahan, ibukota Batola.

Upaya Keluar dari Ketertinggalan

Hingga memasuki 10 tahun pertama era milenium, Kabupaten Batola agak mengalami kesulitan untuk keluar dari ketertinggalan. Terutama akibat revolusi di bidang industri transportasi (dari perahu dayung ke *speed boat* berkecepatan tinggi) yang meniadakan peluang Marabahan menjadi bandar transit bagi angkutan barang dagangan ke Tiga Daerah pedalaman; kemudian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ada perubahan tekanan jaringan perhubungan transportasi dari semula hanya di sungai dan beralih ke darat (Maulani, 2000, p. 138). Kini sarana transportasi sungai hanya dapat ditemukan secara dominan di Kecamatan Kuripan yang memiliki jumlah perahu tanpa motor 1.567 buah, perahu motor tempel 331 buah, kapal motor 1.087 buah (Anonim, 2019a). Namun bersamaan dengan itu, gerak evolusi pembangunan nyaris mencapai garis finis. Tanda-tandanya adalah semakin terbuka akses antar daerah dalam wilayah Kabupaten Batola seperti keberadaan dua jembatan yang menjadikan koneksi daratan antar Kecamatan, antar Kabupaten bahkan antar provinsi. Tahun 2005, Presiden Soeharto meresmikan jembatan Barito di daerah Kecamatan Anjir Muara, yang sesuai namanya jembatan ini membentang di atas sungai Barito dan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia pada waktu itu. Keberadaan jembatan tersebut mampu membangun koneksi tidak hanya wilayah Kabupaten Batola Kecamatan Anjir Muara dengan kota Banjarmasin, tetapi juga menjadi koneksi antar provinsi terutama melalui Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Perlahan tapi pasti daerah-daerah Batola mengalami kemajuan pesat disebabkan menjadi daerah lintasan antar provinsi tersebut.

Kemudian tahun 2007, berdiri lagi jembatan kedua yang melintasi jembatan Barito sekaligus menghubungkan kawasan kota Marabahan dengan kawasan Kecamatan Cerbon. Praktis dari dan menuju kota Marabahan lebih mudah dicapai melalui moda transportasi darat. Mobilitas orang dan barang menjadi intens dilakukan yang pada giliran selanjutnya sektor industri juga ikut ambil bagian dari manfaat kawasan tersebut. Sayangnya keterbukaan akses moda transportasi darat hanya memberikan pengaruh bagi kawasan tertentu saja, seperti daerah Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Tamban dan terlebih lagi Kecamatan Alalak sebagai kawasan pemukiman baru ketika kota Banjarmasin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kekurangan lahan berkembang pesat. Namun secara keseluruhan bukan indikator secara signifikan bagi kemajuan Kabupaten Batola.

Jika Kabupaten Batola pernah menyandang status tertinggal, maka ada satu Kecamatan yang dapat dikatakan paling tertinggal yakni Kecamatan Kuripan oleh karena akses jalan darat belum sepenuhnya terbuka. Selain itu, Kecamatan Kuripan secara geografis merupakan kawasan terluas dalam wilayah Batola dan sebaliknya secara demografis sebagai daerah yang penduduknya paling sedikit. Jadi kenyataan tersebut, membuat pembangunan jarang dilirik karena berat diongkos, apalagi jika mengikuti tren pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif, penduduk Kecamatan Kuripan yang sedikit dibandingkan daerah lain bukanlah prioritas para politisi. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alalak dengan kepadatan sebesar 551 jiwa/ km^2 diikuti oleh Kecamatan Wanaraya yaitu sebesar 364 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Kuripan sebesar 17 jiwa/Km^2 (Anonim, 2009, p. 47).

Dampaknya adalah terkait kebijakan pemerintah Kabupaten dalam membangun daerah cenderung pada kawasan tertentu, sehingga porsi pembangunan Kecamatan Kuripan tercenderung pada antrean terakhir kalau tidak mau dikatakan terlupakan. Pembangunan jalan darat misalnya, total Panjang jalan darat beraspal di Kabupaten Batola adalah 414,03 Km. Kemudian jalan beraspal terpanjang ada di Kecamatan Marabahan yakni 54,69 km, sedangkan terpendek ada di Kecamatan Kuripan yakni 0 Km (Anonim, 2009, p. 330). Warga kecamatan Kuripan sangat berharap proyek Kutabamara (Kuripan, Tabukan, Bakumpai dan Marabahan) benar-benar membangunkan mimpi mereka dari tidur panjang dan menjadi realitas untuk terbentangnya jalan darat mencapai Marabahan, ibukota Kabupaten Batola.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Praktis Kuripan berada pada rantai evolusi terakhir, dan harus diakui angin pembangunan juga berembus perlahan ke wilayah paling utara Kabupaten Batola ini. Pertama, kehadiran jaringan pembangkit listrik negara (PLN) mulai masuk desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kuripan sejak tahun 2007-an. Bergantilah lampu minyak, kemudian listrik dari genset milik pribadi kepada listrik yang dikelola negara, kini warga merasakan terang selama 24 jam. Perlahan barang-barang elektronik sebelumnya hanya terbatas televisi, radio-tape, hingga senter bertambah menjadi pemasak nasi (*rice cooker*), mesin pendingin atau kulkas, hingga mesin sedot air yang membuat warga tidak lagi mandi di tepi sungai bahkan mampu membuat WC di masing-masing rumah. Kedua, hadirnya jaringan telekomunikasi nir-kabel mampu menembus batas geografis. Berbagai informasi dari belahan dunia lainya dapat dinikmati warga. Namun, moda transportasi sungai masih dominan dan hanya bisa ditumpangi pada jam-jam tertentu membuat transportasi orang dan barang mengalami keterbatasan.

Harapan kemajuan muncul melalui peluang kehadiran perkebunan kelapa sawit yang akan dikelola oleh perusahaan, membuat Kecamatan Kuripan menjadi daerah potensial bagi kehadiran investor. Melalui kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit, warga dibuai mimpi-mimpi baru dari petani menjadi karyawan perkebunan sawit atau setidaknya disebut sebagai petani berdasi. Dengan demikian, warga Kecamatan Kuripan akan memiliki peluang bekerja di tempatnya sendiri di perusahaan sawit yang tentu saja sebelumnya mereka bersedia menjual lahan untuk dijadikan perkebunan. Jika bekerja di perusahaan sawit, mereka akan mendapatkan gaji tetap, jaminan kesehatan, bisa kredit dan berbagai kemudahan lainnya terutama dengan dibukanya koperasi. Selain itu terbuka akses darat yang dibuat oleh perusahaan perkebunan sawit sehingga warga pun dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memanfaatkan jalan darat tersebut sebagai penghubung antar desa, bahkan dari desa menuju ibukota Kabupaten. Atas dasar itulah, beberapa desa kemudian menyatakan kesediaan menjual lahan, menjadi petani plasma, kemudian bekerja sebagai buruh/ karyawan sawit. Namun anehnya penduduk desa Jambu Baru tidak bersedia kawasan desanya dijadikan areal perkebunan sawit. Tentu saja pertanyaannya adalah kenapa dan ada apa warga desa ini menolak perkebunan sawit.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB
4

NASIB SETANGKAI PADI DAN PURUN

Lambang Kabupaten Barito Kuala (Batola)

Kabupaten Batola memiliki lambang daerah yang mengandung unsur padi dan purun. Kedua jenis tanaman ini bukanlah sekedar aksesoris dalam lambang yang hanya menempel sebagai pelengkap atau pengingat saja, sebab lebih dari itu padi dan purun adalah tumbuhan atau tanaman yang sangat mudah ditemukan di berbagai wilayah Kabupaten Batola. Padi, misalnya, merupakan tanaman yang menandai pekerjaan utama penduduk Batola sebagai petani. Oleh karena itulah, Kabupaten Batola merupakan daerah penyangga pertanian di Kalimantan Selatan dan menjadi penentu stabilitas ketahanan pangan terlebih lagi wilayah Batola termasuk terluas di bandingkan Kabupaten lain di provinsi Kalimantan Selatan. Di Batola terdapat daerah-daerah yang terkenal hasil beras premium dari Kecamatan Anjir Pasar dan Anjir Muara, maka apabila disebutkan "baras Anjir" berarti beras tersebut jaminan mutu bagi masyarakat.

Adapun tanaman purun adalah bahan baku untuk berbagai anyaman yang tumbuh di daerah Batola terutama kawasan pasang surut. Purun bukanlah tanaman liar tetapi ditanam warga dan dipanen sekali setahun. Purun yang sudah layak dipanen diolah dengan beberapa tahap agar bisa dianyam, terlebih dahulu dibersihkan batangnya, dijemur hingga kering, ditumbuk hingga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kemudian siap dianyam. Produk anyaman purun umumnya dibuat *kampil* (tikar) oleh pengrajin, yang biasanya dikumpul hingga puluhan bahkan ratusan jumlahnya setelah itu barulah dijual. Akumulasi ratusan tikar berarti jumlah pendapatan lebih tinggi dari pada dijual per lembar. Selain itu, anyaman purun dapat dibuat dalam bentuk topi, keranjang, hingga kantong raksasa disebut *bandat* untuk menampung ratusan liter padi hasil panen warga.

Dengan demikian, padi dan purun merupakan ciri khas petani Batola juga merupakan fondasi ekonomi kerakyatan yang praktiknya langsung dikerjakan oleh warga dan hasilnya pun secara langsung diterima oleh warga atau masyarakat Batola. Kuatnya doktrin di kalangan petani untuk terus menanam padi, sampai ada ungkapan "Kalau pun ada orang mengeruk emas, bertanam padi hendaklah jangan diabaikan". Nilai emas dan padi memang sangat jauh berbeda, tetapi bagi petani, padi tidak bisa ditinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan jika emas tidak bisa dimakan, tetapi kita bisa menjadikan padi sebagai beras dan memasaknya menjadi nasi untuk dimakan. Wal hasil, meskipun Batola sempat tertinggal dalam standar pembangunan nasional, tetapi ketahanan pangan warga tetap tidak tergoyahkan selama mereka menjadi petani.

Foto 2 Lambang Kabupaten Batola



Sumber: Internet

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dari lambang Kabupaten Batola, yang perlu dicermati adalah terdapat tanaman purun di sebelah kiri dan padi di sebelah kanan. Padi warna kuning dan purun warna hijau mencerminkan sandaran hidup sebagian rakyat/masyarakat daerah ini adalah dari kedua jenis tanaman ini (Anonim, 2015). Padi dan purun juga menjadi simbolisasi tanaman sejenis yang akrab dengan daerah rawa. Meskipun simbol itu sedemikian nyata dalam lambang daerah, saat ini luas sawah irigasi dan non irigasi berjumlah 120.037 Ha dengan produksi padi sawah setara beras tahun 2018 sebesar 233.860 ton (Anonim, 2019a), bandingan sekitar 10 tahun lalu atau tahun 2008, luas lahan pertanian sebesar 220.946 ha dan produksi padi 336.062 ton (Anonim, 2009, p. 156). Jadi ada penurunan luas tanaman padi dan lahannya, yang disebabkan oleh banyak faktor seperti pembangunan pemukiman, atau terbukanya sektor lain seperti perkebunan. Agaknya hal ini paralel gambaran umum penggunaan tanah di Kalimantan Selatan yang sebagian besar berupa hutan (30,16 persen). Sekitar 26,09 persen lahan digunakan untuk lahan perkebunan serta kebun campuran dan 10,98 persen untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 2,33 persen dan untuk pertambangan sekitar 1,44 persen (Anonim, 2019b, p. 4).

Sebaliknya tanaman purun, sebagai sektor perkebunan kini hanya ditemukan di 5 Kecamatan dari total 17 Kecamatan yakni dari terluas adalah Kecamatan Kuripan 420 Ha, Kecamatan Bakumpai 384 Ha, Kecamatan Tabukan 100 Ha, Jejangkit seluas 82 Ha, dan Kecamatan Cerbon 13 Ha total 968 ha tahun 2018, mengalami kenaikan jika dilihat pada tahun 2017 seluas 803 Ha. Bandingkan dengan kelapa sawit pada tahun 2018 berjumlah 3.975 Ha dengan produksi 3.887,92 ton (Anonim, 2019a). Hal ini sejalan dengan keberadaan perusahaan perkebunan sawit sebagaimana tabel di bawah ini:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 1 Data Perusahaan Besar Swasta di Kabupaten Batola

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luasan (ha)
1.	PT. Agri Bumi Sentosa	Kec. Marabahan, Barambai, Wanaraya, Tabukan	12.409
2.	PT. Putra Bangun Bersama	Kec. Cerbon, Rantau Badauh dan Jajangkit	10.000
3.	PT. Tasnindo Agro Lestari	Kec. Kuripan dan Bakumpai	10.810
4.	PT. Tiga Daun Kapuas	Kec. Tamban, Mekarsari dan Tabunganen	9.000
5.	PT. Barito Putera Plantation	Kec. Marabahan, Kuripan, Tabukan, Bakumpai	15.017
6.	PT. Anugerah Watiendo	Kecamatan Anjir Pasar, Anjir Muara, Mekar sari	6.000

Sumber : diolah dari beberapa sumber (Adenansi, 2014, p. 4)

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tabel di atas selain menunjukkan fenomena berkembang dengan total luas lahan puluhan ribu hektar, juga menimbulkan monokultur usaha perkebunan. Kiranya perlu kita mencermati tulisan lama yang Scott yang dicetak kembali, bahwa akan terjadi kerawanan monokultur dalam suatu perekonomian yang bersifat komersial, berpengaruh eksploitasi sangat bergantung pada kejutan-kejutan yang berasal dari luar, tetapi kejutan-kejutan itu sering kali sangat spesifik untuk satu sektor, sehingga memerlukan analisis tersendiri (Scott, 2019, p. 324). Masyarakat Batola terutama di Kecamatan Kuripan dan Tabukan pernah berjaya dengan harga rotan yang melambung di pasar internasional, tetapi harga rotan kemudian jatuh ke level terendah manakala pemerintah melarang ekspor rotan basah. Hal ini sangat mempengaruhi warga untuk sekian waktu yang cukup lama, beruntung mata pencaharian warga masih terdapat berbagai alternatif dan areal rotan tidak berada pada lahan yang masif karena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

umumnya hanya tumbuh pada daerah tepian sungai Barito. Begitu pula hal yang sama dapat terjadi pada sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya minyak kelapa sawit sedang diperjuangkan agar harganya tidak jatuh di pasar Uni Eropa. Kelapa sawit Indonesia akan dilarang masuk Uni Eropa (UE) karena dianggap menjadi sumber deforestasi sampai 5 juta hektar pada periode 2008-2016 yang membuat sibuk pemerintah Indonesia menangkal tuduhan tersebut (Arifin, 2019) Selain itu, ancaman lain dari dampak ekonomi akibat virus Korona dari China yang mendunia. Sekitar 29 persen dari barang yang diekspor China, bahan mentahnya dan penolongnya berasal dari Indonesia (terutama batu bara dan kelapa sawit). Implikasinya kita perlu mengantisipasi penurunan permintaan untuk produk-produk tersebut (Basri, 2020).

Menjadi Karyawan, Buruh atau Tetap Sebagai Petani?

Persoalannya konversi lahan gambut yang di dalamnya sawah, tanaman purun, bahkan hutan galam menjadi lahan perkebunan sawit tidak hanya mengubah ekologi tetapi juga mengubah kultur petani menjadi karyawan atau buruh. Data dari Badan Pusat Statistik dalam buku Batola dalam Angka menunjukkan dari tahun ke tahun semakin sempitnya lahan pertanian dan sebaliknya, lahan perkebunan semakin luas.

Bekerja sebagai petani umumnya mengikuti pola waktu berdasarkan hitungan musim yang menentukan mereka harus bekerja untuk mengolah sawah agar siap tanam, menanam benih padi, membersihkan padi dari rumput, hingga sampai waktu panen. Artinya waktu kerja mereka ditentukan oleh toleransi waktu yang cukup fleksibel. Sebaliknya jika mereka bekerja sebagai karyawan atau buruh di perusahaan sawit akan ada banyak aspek yang sangat berbeda dari aktivitas sebagai petani. Pertama, mereka bekerja secara personal tidak secara komunal yang hasilnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tergantung kemampuan sendiri bukan kerja sama tim. Kedua, secara waktu terdapat toleransi yang sempit karena menggunakan hitungan jam. Ketiga, jika sebagai petani diperintah oleh diri sendiri, atau setidaknya tergantung kepada pihak tertentu tempat bekerja, sebaliknya menjadi karyawan atau buruh sawit, mereka di bawah pengawasan mandor di perkebunan.

Foto 3 Lokasi Jambu Baru yang Digarap PT TAL



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Persoalan paling mendasar jika perluasan lahan untuk perkebunan sawit semakin berkembang, sedangkan lahan pertanian mengalami stagnasi atau tidak mengalami ekstensifikasi dan intensifikasi, maka yang menjadi pertanyaan utama bagaimana nasib lambang Batola yang terdapat padi dan purun. Pertanyaan lanjutan, apakah sempitnya lahan padi dan purun akan membuat identitas Batola berubah? Apakah padi dan purun hanya menjadi ingatan publik terutama warga Batola bahwa dulu pertanian dan industri kerajinan tangan rakyat pernah menjadi landasan ekonomi warga. Pertanyaan-pertanyaan ini setidaknya menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kontemplasi atau syukur jika menjadi introspeksi mempertahankan padi dan purun yang juga berarti mempertahankan lambang Batola itu sendiri. Selain itu, penting merubah imej kata "petani" identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Suatu saat petani Batola yang menghasilkan padi atau beras dan kerajinan tangan berupa anyaman yang berkualitas tinggi akan mengalami masa kemakmuran secara ekonomi pada masa mendatang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB
5

MENJAGA BENTENG TERAKHIR LAHAN GAMBUT

"Djamboe Baroe" *Lebu* Bakumpai

Desa (*lebu*) Jambu Baru merupakan salah satu desa tua di kawasan tepian sungai Barito. Ada dua alasan untuk membuktikan hal ini yakni dari penuturan almarhumah Hj. Badariah dan melalui peta peninggalan Belanda. Hj Badariah ketika diwawancara telah berumur kurang lebih 80 tahun dan meninggal sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya semasa kecil desa Jambu Baru hanya terdiri dari beberapa rumah saja dan bentuk rumah waktu itu masih tradisional yakni menggunakan anjung kiri dan anjung kanan seperti rumah adat Banjar. Waktu itu, Hj Badariah masih sempat melihat almarhum datuknya yang sudah renta, berjalan terbungkuk-bungkuk dan menggunakan tongkat. Dari cerita singkat itu dapat diketahui, setidaknya jika seseorang masih hidup dengan Datuknya atau generasi ketiga maka jeda usia tentu lebih dari 50 tahun. Dengan demikian desa Jambu Baru dapat dipastikan meskipun tidak memiliki angka yang tepat tetapi berusia ratusan tahun.

Melalui peta yang sepertinya buatan dari kolonial menunjukkan pemukiman penduduk di desa Jambu Baru masih sangat sedikit. Adapun ejaan yang dipakai masih bentuk lama sehingga disebutkan Djamboe dan dibaca Jambu. Lantas kenapa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jambu saja tanpa ada tambahan kata Jambu Baru. Hal ini disebabkan hubungan dengan desa tetangga yang kemudian menamakan dirinya Jambu, sehingga untuk membedakan dibuatlah nama tambahan Jambu Baru. Adapun desa yang disebut Jambu itu, sebenarnya bernama Hampelas sebagaimana peta di bawah.

Foto 4 Peta Jambu Baru dan Sekitarnya di masa lalu

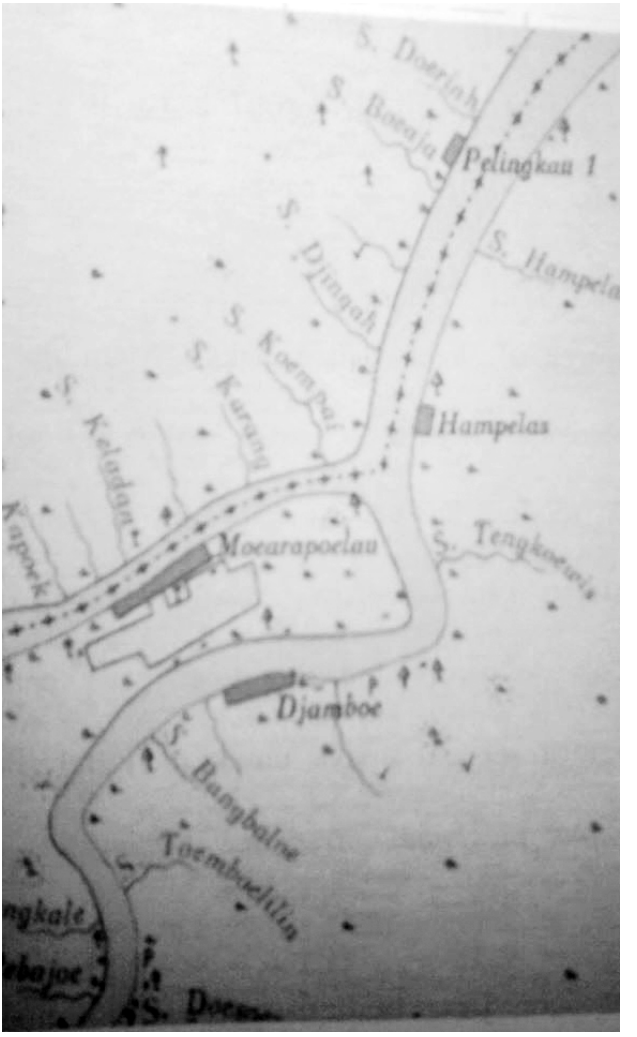


Foto dari Internet

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagaimana gambar peta di atas, terdapat tanda batangan berwarna merah yang barangkali menandai panjang desa pada waktu itu. Adapun peta di atas merupakan koleksi penulis yang didapatkan dari situs internet tetapi sekarang tidak bisa dilacak alamat webnya. Selain itu, kawasan desa Jambu Baru terdapat garis memanjang ke dalam yang sebagai tanda sungai. Misalnya S. Bangbaloe yang keberadaan sungai tersebut memang ada tetapi oleh warga disebut sungai Mambalu. Kemudian terdapat tulisan S. Toemboelilin dan oleh warga disebut Sungai Tambulilin. Menariknya ada dua sungai tak bernama mengapit lokasi desa "Djamboe" tersebut, ternyata di masa sekarang sungai itu sudah tidak ada lagi. Orang tua menceritakan bahwa di masa lalu memang ada sungai kecil, berarti ada proses yang cukup lama sehingga sungai itu tidak ada dalam realitas sebagaimana peta itu.

Padang Bukan Lahan Kosong

Masyarakat Kabupaten Batola, orang Bakumpai mengenal konsep ruang yang terbagi dari empat yakni *ngaju* atau hulu, *ngawa* atau hilir, *ngambu* atau darat, dan laut atau daerah muara. Konsep ini tentu saja berorientasi sungai yang sangat berbeda dengan konsep berdasarkan arah mata angin. Konsep berorientasi sungai tersebut mempengaruhi mobilitas warga daerah aliran sungai yang mengenal istilah *mansuh* atau *labuh* yakni bergerak menuju hulu, sebaliknya mudik berarti bergerak menuju hilir, sedangkan *mandai* atau naik artinya bergerak menuju atas atau daratan dan sering disebut padang, dan turun bergerak menuju laut atau muara (Nasrullah, 2008).

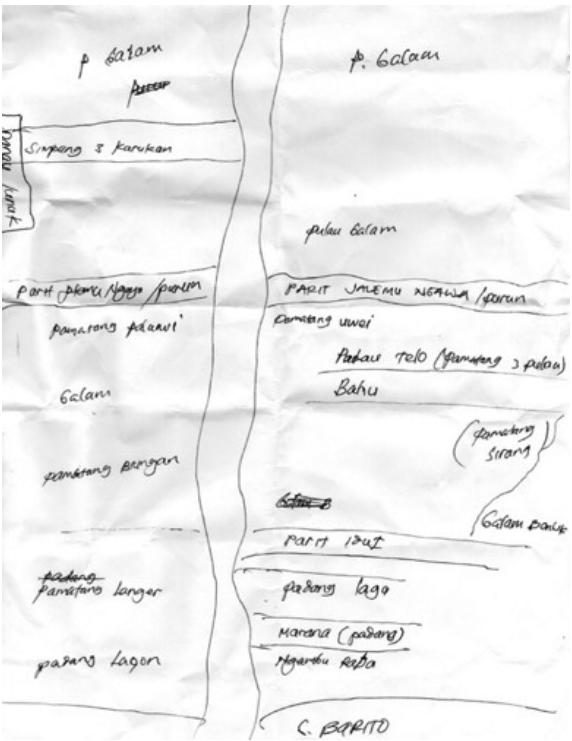
Istilah padang merujuk pada kawasan pasang surut yang digunakan oleh warga sebagai lahan untuk bekerja yang dapat dicapai menggunakan jukung, kelotok kecil melalui sungai-sungai kecil atau anak sungai Barito. Umumnya padang ditumbuhi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanaman rerumputan, pohon galam, dan tanaman purun yang dibudidayakan warga. Selain itu, penduduk juga membuat sumur atau beje sebagai perangkap alami bagi ikan yang akan mengikuti genangan air di musim kemarau. Jadi keseharian warga selain tinggal di perkampungan, maka jika mereka bekerja seperti mencari ikan, menebang pohon, mengambil tanaman purun, menjerat burung atau rusa adalah pergi ke padang. Oleh karena itu, penduduk yang bekerja dari tua sampai anak-anak sangat akrab dengan daerah padang dan memberikan nama-nama pada tempat tertentu di padang tersebut.

Bagi warga desa Jambu Baru, mereka memiliki banyak nama tentang areal padang tersebut sebagaimana foto di bawah ini:

Foto 5 Nama-nama Daerah Padang



Dibuat oleh Madiani

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cerita tentang asal usul nama tempat tersebut, misalnya Parit Jalemu, adalah kawasan sebelum adanya akses perahu bermotor, merupakan areal terjauh yang dapat dicapai menggunakan jukung atau jalan kaki. Parit Jalemu merupakan kawasan padang rumput yang memanjang seperti sebuah jalan besar dan di tempat itulah warga menanam purun, membuat sumur/beje yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Konon menurut warga, kawasan Parit Jalemu adalah sungai purba sebelum adanya sungai Barito. Sayangnya belum ada bukti temuan arkeologis yang membenarkan cerita tentang sungai purba itu.

Nama lain adalah Padang Marana, menurut tokoh masyarakat seperti Maliadi, penamaan tempat itu karena ada warga yang membuat *hubung* atau bivak yang digunakan selama mereka bekerja dan tidak repot pulang pergi ke kampung. Rupanya usaha menetap sementara di kawasan itu tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga ia menyampaikan keluhannya dengan menulis "merana" pada dinding *hubung*. Sejak itulah kawasan tersebut dinamakan Marana. Versi lain, menurut Murni latar belakang penamaan karena pengalaman bersama orang yang mencari ikan di tempat itu tidak mendapatkan hasil maksimal, sehingga mereka pun sama menyebutnya Marana.

Nama-nama padang seperti contoh di atas juga dapat ditemukan di setiap desa yang menandakan kawasan memiliki kaitan dalam pengalaman, kenangan, dan kesan warga di suatu desa. Itulah sebabnya ingatan historikal, psikologis dan gambaran futuristis terkait padang yang selalu menjadi bagian dari kehidupan warga.

Makna Nama-nama Areal Padang

Adanya nama-nama padang itu juga membuktikan, sebagaimana kata tokoh masyarakat yang lain seperti Madiani

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahwa lahan itu bukan lahan kosong yang tidak digunakan. Nama tersebut membuktikan adanya aktivitas warga yang terus menerus dilakukan, jadi menurutnya, tidak benar kalau ada yang mengatakan tempat itu hanya lahan kosong. Berdasarkan fungsi padang merupakan sumber mata pencaharian warga desa Jambu-Baru, maka jauh sebelum adanya perkebunan kelapa sawit saat ini, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga padang agar tidak dieksplorasi. Pada musim-musim tertentu terdapat larangan menangkap ikan agar ikan mengalami proses regenerasi secara sempurna baik secara jumlah, maupun ukurannya, pihak pemerintah desa pun membuat pengumuman yang mencantumkan larangan tersebut.

Foto 6 Larangan Mengeksploitasi Ikan



Foto Inas

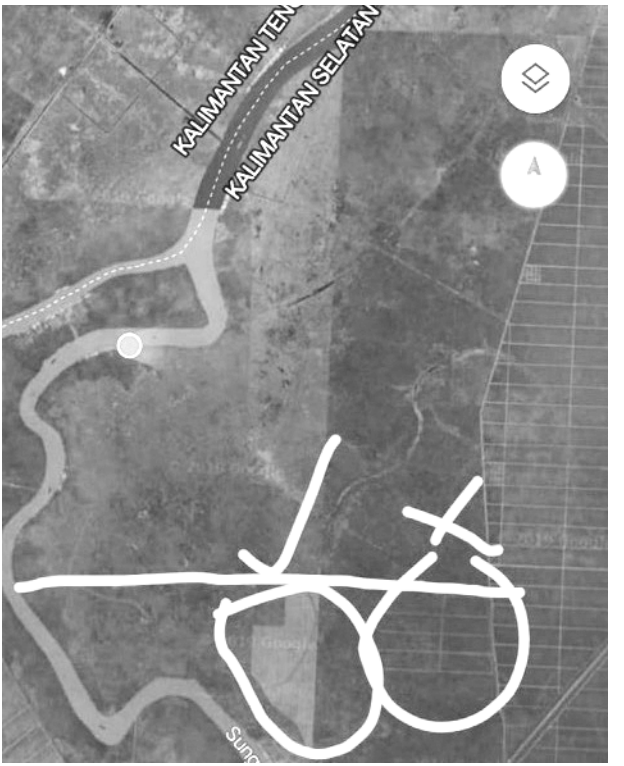
Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto spanduk di atas dapat dengan mudah dipahami adanya larangan tertulis bagi yang melakukan berbagai aktivitas mencari ikan baik secara tradisional dengan cara memancing hingga menggunakan teknologi elektrik atau setrum. Lokasi yang dikelola oleh warga desa, secara implisit terdapat larangan bagi pemancing atau pencari ikan dari luar desa untuk mengakses wilayah tersebut. Sebab biasanya para pemancing datang dengan menggunakan sepeda motor atau menaiki perahu dan langsung menuju tempat yang menurut mereka banyak ikannya yang dikira tempat tak bertuan. Padahal di situlah kawasan yang dipelihara warga, maka larangan itu juga berlaku bagi sesama warga yang pada intinya agar tidak mengeksploitasi sumber daya alam di padang tersebut untuk jangka waktu tertentu.

Kesepakatan bersama warga untuk tidak beraktivitas di kawasan padang baik mencari ikan atau pun menebang pohon galam sering kali disampaikan dalam pengumuman tertulis. Meski pengumuman tersebut tidak mencantumkan sanksi bagi warga yang melanggar tetapi pada umumnya ditaati warga karena semua berpulang pada kepentingan bersama juga. Pengumuman yang ditujukan baik kepada orang luar desa maupun larangan sesama warga desa menunjukkan betapa pentingnya fungsi padang bagi kehidupan khususnya kelangsungan mata pencaharian warga. Mereka merelakan ada jeda waktu tidak bekerja di tempat tersebut demi *recovery* (pemulihan kembali) baik lingkungan alam, ikan, dan lain sebagainya. Jika menangkap ikan saja terdapat larangan pada waktu tertentu, apalagi untuk sebuah kegiatan lebih ekstrem. Atas dasar itulah warga menolak keras upaya pihak perusahaan yang mengonversi lahan padang menjadi areal perkebunan sawit.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 7 Kawasan yang Diduga Diserobot PT TAL Dilihat Dari Google Map



Mencermati foto di atas menunjukkan betapa lahan yang bertanda "X" sebagai kawasan konflik, sedangkan yang bertanda "√" dikhawatirkan warga digarap oleh perusahaan. Adapun foto lokasi PT TAL dengan menggunakan kode angka atau nomor pada lahan padang, berarti telah menggantikan pengalaman hidup warga Jambu Baru melalui nama-nama *padang* dengan istilah penamaan ala perusahaan yang tiba-tiba saja ada di situ. Hal ini juga berarti kepemilikan lahan yang dulunya bersifat komunal kini menjadi milik kelompok tertentu, padahal di kawasan *padang* warga tidak memiliki atau menyatakan tanah tersebut milik mereka baik secara personal atau komunal kecuali atas kepemilikan sumur dan kebun purun dan *tatas* (anak sungai).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 8 Blok Lahan Berdasarkan Angka akan Digarap Perusahaan Sawit

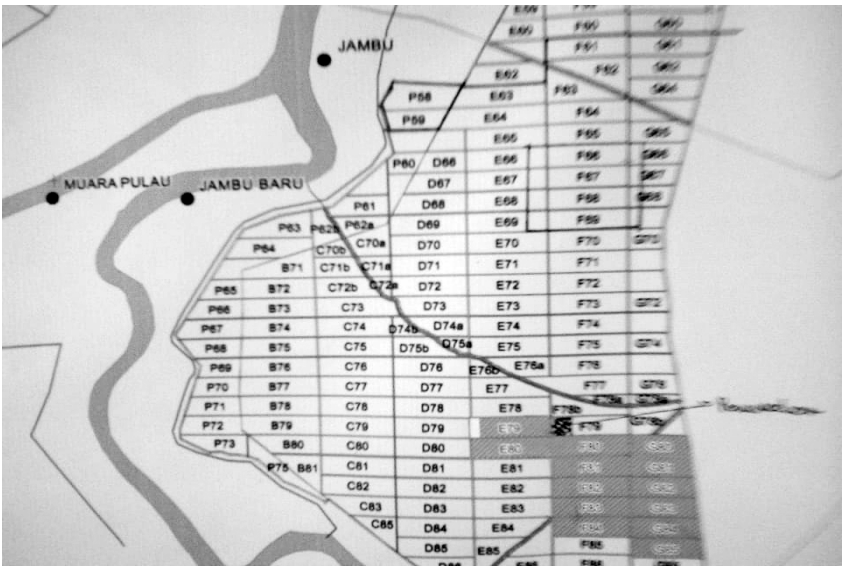


Foto Istimewa

Kepemilikan hanya pada areal tertentu yang digunakan sebagai lahan bekerja. Jika ada salah satu warga membuat jalur yang memudahkan mencapai tempat bekerja dengan berjalan kaki atau menggunakan jukung dinamakan *tatas*, misalnya untuk mencari galam, maka lokasi tersebut menjadi miliknya. Jika ada orang lain ingin menggunakan tempat itu maka dia harus meminta izin terlebih dahulu, tetapi bukan berarti tanah berada di sekitar tempat tersebut adalah milik pribadi.

Begitu pula dengan warga yang menanam purun atau berkebun purun, maka areal kebun purun tersebut adalah miliknya tetapi tanah tersebut bukan milik pribadi. Hal yang sama dengan kepemilikan sumur atau beje, yang jelas menggunakan tanah atau menggali tanah untuk dibuat sumur dalam bentuk memanjang. Kalau pun kemudian sumur dapat diperjual belikan, juga tidak secara eksplisit tanah tersebut dimiliki sang pemilik sumur.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB
6

MENOLAK SEJAK DULU

Digoda Menjadi Petani Berdasi

Jauh sebelum keberadaan perkebunan kelapa sawit secara masif ada di Batola, masyarakat sudah melakukan reaksi berupa penolakan. Penolakan pertama adalah dalam bentuk artikel di media massa *Radar Banjar*, terbit 3 Desember 2007 dengan judul "Menimbang Perkebunan Sawit di Batola". Berikut beberapa kutipan artikel tersebut.

> Adapun di Kuripan Batola, pekerjaan masyarakat adalah mencari ikan, bertanam purun, menebang pohon galam, hingga mencari burung dan madu tidak hanya pekerjaan utama melainkan pertahanan hidup mereka yang terakhir. Untuk pekerjaan utama tersebut, bersiaplah masyarakat untuk mengucapkan selamat tinggal.
>
> Lahan tersebut akan gundul membentang, lalu dibagi lahan untuk menanam kelapa sawit kepada masyarakat, nantinya akan diberikan sertifikat. Pembagian lahan tentunya dilakukan secara undian acak (*random*), supaya lebih adil penempatannya, permasalahannya masyarakat dan lahan tersebut menjadi a-historis atau kehilangan sejarah. Tidak ada lagi nama yang menandakan tempat tersebut, semuanya telah menjadi rata. Di sini kita akan dipisahkan dengan alam dan kebudayaan kita, bahkan akan menerima pengotakan kepemilikan lahan hanya beberapa hektar.
>
> Segera setelah sawit ditanam masyarakat yang merdeka akan terperangkap dalam sistem perkebunan yang monopolitik. Tidak ada tempat bagi masyarakat untuk menjual sawit selain ke pabrik perusahaan, dan perusahaanlah penentu harganya,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

angkutan perusahaanlah pulalah yang berkemungkinan mendapat keuntungan dari jasa angkut sawit, dari jasa penimbangan. Buah sawit yang mudah busuk itu akan tersia-sia jika perusahaan terlambat mengangkutnya atau tidak bersedia mengangkutnya karena katakanlah alasan jalan buruk karena musim hujan, hal seperti ini terjadi di berbagai tempat di Sumatera.

Dengan pola plasma, pada akhirnya memang tanah dan sawit akan kembali ke masyarakat setelah kreditnya lunas, biasanya hal itu bisa dilunasi masyarakat setelah sawit berumur 7 tahun atau lebih. Setelah itu produktivitas sawit merosot dan hanya dapat ditingkatkan dengan pemupukan rutin, lagi-lagi masyarakat akan tergantung dengan pupuk yang harganya bisa naik.

Bagaimanakah sistem pengambilan keputusan persetujuan masyarakat untuk perkebunan sawit? Kuat dugaan sistem pengambilan keputusan (musyawarah desa) langsung dari atas ke bawah, melalui pihak elit desa, masyarakat hanya dikampanyekan janji-janji manis. Sama sekali tidak *buttom-up*, saya mengetahui beberapa anggota masyarakat yang tidak setuju, mereka merupakan orang-orang yang benar-benar bergelut bekerja memanfaatkan hasil alam di padang. Mereka baik secara rasional maupun insting tahu berguna atau tidaknya jika suatu rencana dijalankan di tempat tersebut, suara-suara dari "kelompok akar rumput" seperti itu cenderung diabaikan.

Kemudian jika ditanam, selama menunggu masa produksi mungkin sekitar lima tahun ke depan, apa yang dilakukan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup?? Berapa upah perawatan kelapa sawit hingga dia mencapai usaha produktif? Jika upah tersebut tidak memadai, atau dengan tolak ukur hasil kerja penduduk sehari-hari, maka entah ke mana penduduk mencari nafkah hidup selama masa penantian panen sawit. Apakah akan muncul para dermawan yang bersedia meminjamkan uang, dan bisa dikembalikan tanpa batas waktu atau setidaknya mencicil dengan jaminan hasil kebun sawit. Kala masa panen tiba, tentu polanya bagi hasil dan pihak prosentasi untuk masyarakat akan lebih sedikit, karena wajar saja perusahaan yang memberikan modal dan membuka lahan sedangkan masyarakat hanya menanam (Nasrullah, 2007).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tulisan yang bernada pesimis dan sinis pada waktu itu tentu hanya dipandang sebelah mata, apalagi gambaran perkebunan sawit selalu memberikan janji manis. Menurut Aswadie (35 tahun) warga digoda dengan istilah "petani berdasi". Ini memberikan bayangan keuntungan lebih dari apa yang dilakukan warga sebagaimana pekerjaan mereka sehari hari. Namun agaknya warga juga berpikir rasional komparatif ketika melihat kegagalan megaproyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah yang tidak jauh jaraknya dari desa Jambu Baru. Proyek yang di-*back up* sepenuhnya oleh pemerintahan di era Orde Baru dengan niat baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian ternyata gagal. Bahkan justru menghilangkan kepemilikan lahan warga desa tetangga yang terkena lokasi proyek sejuta hektar tersebut dengan sebutan ganti rugi.

Malepahan Petak Danum (Menghilangkan Tanah Air)

Menurut Ni Ulak Icai (Asrani), ia mendengar penuturan dari desa tetangga yang lahan mereka menjadi Kawasan proyek lahan gambut tersebut. "*Lepah petak danum ikih tajual*, *utuh heka bagawi*" (Sudah habis tanah air kami dijual, sekarang susah bekerja). Akibat lahan untuk bekerja dijual demi suksesnya proyek lahan gambut sejuta hektar, mereka yang mendapatkan uang dan mendapatkan keuntungan sementara, tapi proyek yang dimulai sekitar tahun 1997 dan 22 tahun kemudian yakni 2019 keluhan demi keluhan warga semakin nyaring terdengar. Berkaca dari kenyataan itulah, warga desa Jambu Baru berpikir ke depan, mereka akan kehilangan lahan pekerjaan yang diwarisi turun temurun.

Sebelumnya telah dibuka lahan perusahaan PT Kodeco yang bergerak di bidang tanaman kelapa hibrida yang juga berada di sekitar daerah Balukung. Perusahaan tersebut oleh warga disebut perusahaan "Tuan Yu" yang barangkali pemiliknya berasal dari

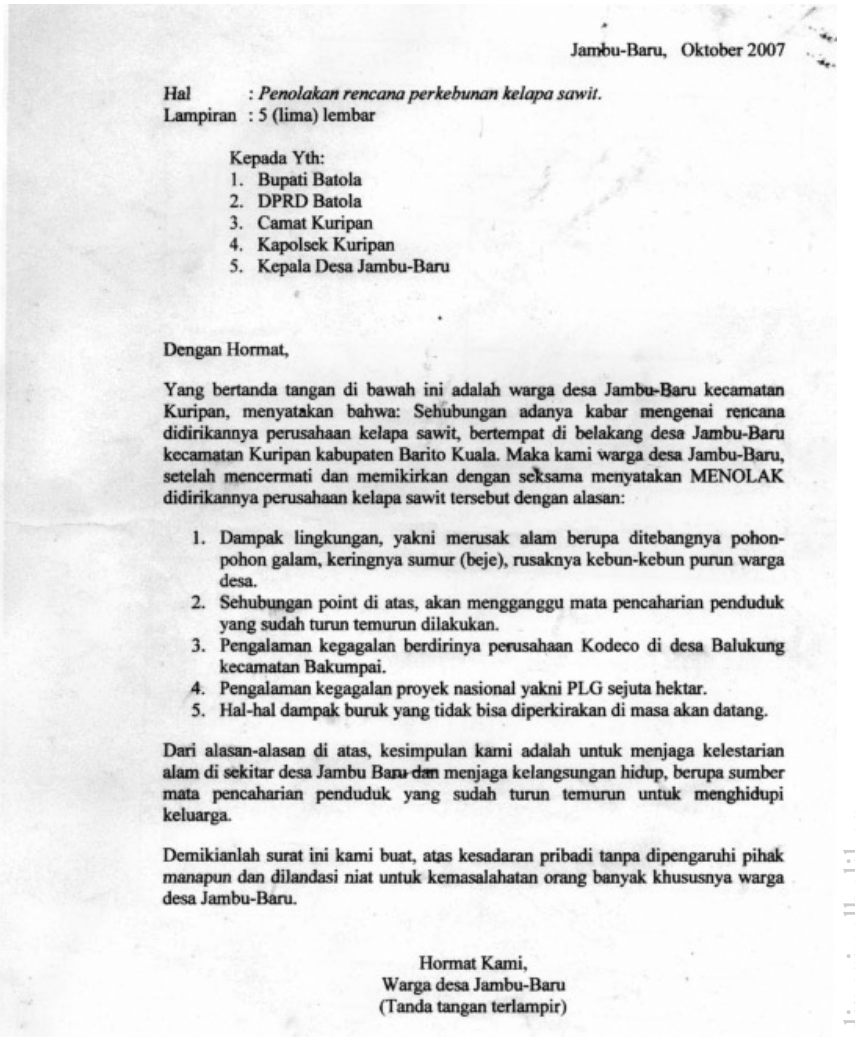
Buku ini tidak diperjualbelikan.

Korea. Awal pembukaan perusahaan tersebut, warga sekitar Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Bakumpai terlibat aktif pembukaan lahan yang bekerja untuk tebang tebas pohon galam. Areal perusahaan untuk sekian waktu menjadi ramai oleh kelotok berjumlah puluhan bahkan ratusan menuju lokasi perusahaan tersebut melalui kanal buatan yang bermuara di sungai Barito. Namun begitu perusahaan tersebut beroperasi dengan menanam kelapa hibrida, ternyata belum juga berhasil menaklukkan lahan gambut. Padahal waktu itu, areal perusahaan sendiri dapat dikatakan steril dari areal kerja masyarakat setempat.

Pengalaman-pengalaman demikian membuat warga Jambu Baru memilih sedia payung sebelum hujan, atau berupaya mencegah sebelum perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi yakni mengirimkan surat penolakan. Dalam surat penolakan itu juga dijelaskan kekhawatiran warga akan terganggunya lingkungan ditebang habis pohon galam dan kerusakan pada tanaman purun. Atas dasar itulah warga menolak lahannya dikonversi ke dalam perusahaan perkebunan sawit yang akhirnya nanti mereka tidak akan memiliki lahan untuk dijadikan akses mata pencaharian.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 9 Menolak Sawit Sejak 2007



Jambu-Baru, Oktober 2007

Hal : *Penolakan rencana perkebunan kelapa sawit.*
Lampiran : 5 (lima) lembar

Kepada Yth:
1. Bupati Batola
2. DPRD Batola
3. Camat Kuripan
4. Kapolsek Kuripan
5. Kepala Desa Jambu-Baru

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah warga desa Jambu-Baru kecamatan Kuripan, menyatakan bahwa: Sehubungan adanya kabar mengenai rencana didirikannya perusahaan kelapa sawit, bertempat di belakang desa Jambu-Baru kecamatan Kuripan kabupaten Barito Kuala. Maka kami warga desa Jambu-Baru, setelah mencermati dan memikirkan dengan seksama menyatakan MENOLAK didirikannya perusahaan kelapa sawit tersebut dengan alasan:

1. Dampak lingkungan, yakni merusak alam berupa ditebangnya pohon-pohon galam, keringnya sumur (beje), rusaknya kebun-kebun purun warga desa.
2. Sehubungan point di atas, akan mengganggu mata pencaharian penduduk yang sudah turun temurun dilakukan.
3. Pengalaman kegagalan berdirinya perusahaan Kodeco di desa Balukung kecamatan Bakumpai.
4. Pengalaman kegagalan proyek nasional yakni PLG sejuta hektar.
5. Hal-hal dampak buruk yang tidak bisa diperkirakan di masa akan datang.

Dari alasan-alasan di atas, kesimpulan kami adalah untuk menjaga kelestarian alam di sekitar desa Jambu Baru dan menjaga kelangsungan hidup, berupa sumber mata pencaharian penduduk yang sudah turun temurun untuk menghidupi keluarga.

Demikianlah surat ini kami buat, atas kesadaran pribadi tanpa dipengaruhi pihak manapun dan dilandasi niat untuk kemasalahatan orang banyak khususnya warga desa Jambu-Baru.

Hormat Kami,
Warga desa Jambu-Baru
(Tanda tangan terlampir)

Naskah Koleksi Rahman

Demikianlah surat yang ditandatangani 70 warga itu pun dikirim ke kepala daerah atau bupati Batola, DPRD Batola, Camat Kuripan, Kapolsek Kuripan bahkan kepada kepala desa Jambu Baru sendiri. Namun agaknya surat tersebut hanya menjadi bukti

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tertulis bagi warga bahwa mereka menolak, sementara tidak ada tanggapan dari pihak penerima surat.

Selain kesadaran warga untuk mempertahankan padang, alasan aktual mereka ketika mengamati pembukaan lahan menjadi kawasan perkebunan sawit di desa-desa tetangga tidak menunjukkan kemajuan. Menurut tokoh pemuda Halidi, ketika ia berkunjung ke desa tetangga yang telah ditanami sawit, ia menyaksikan warga desa hanya sibuk bermain kartu bahkan ada yang berkata "*Kakatuh beh gawian ikih mandau-mandau*" (Begitulah pekerjaan kami sehari-hari). Dengan demikian, warga desa tetangga yang sehari-hari bermain kartu menjadi indikator bahwa lapangan pekerjaan tidak tersedia setelah perkebunan sawit berada di daerah mereka.

Selain itu, menurut Aslian telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Pihak perusahaan telah banyak memberhentikan warga dari berbagai desa. Alasannya adalah pihak perusahaan menerima karyawan dengan kualifikasi tertentu, seperti ijazah minimal SMP dan atau SMA. Warga yang berumur di atas 30 tahun, rata-rata hanya tamat SD dan tentu saja peluang mereka untuk bekerja sangat sulit sedangkan pekerjaan sehari-hari warga sebagaimana telah dijelaskan di bagian terdahulu, misalnya menebang pohon galam sudah kecil kemungkinan dilakukan karena lahannya berubah menjadi areal perkebunan sawit. Padahal, hasil penjualan potongan kayu galam tersebut ternyata memberikan pendapatan lebih dari Rp 150 ribu setiap hari, sementara mereka tidak berangkat bekerja di pagi buta, dan apalagi pulang hingga menjelang malam. Itulah sebabnya, gaji sebagai karyawan atau buruh perusahaan ternyata lebih kecil dalam kalkulasi warga apabila dikomparasi dengan pekerjaan sehari-hari seperti mencari galam.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 7

TAMU TAK DIUNDANG

Datang Silih Berganti

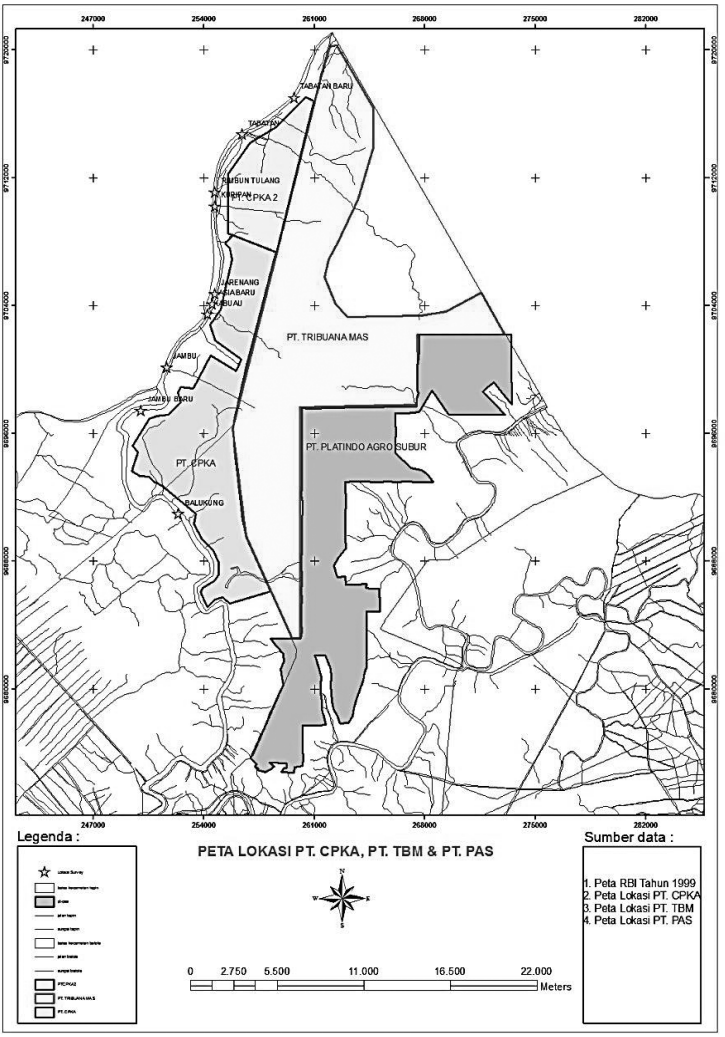
Seperti menemukan secercah cahaya di ujung lorong melalui kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan membuat daerah seperti Kecamatan Kuripan yang dulu tidak diperhatikan kini menjadi potensial bagi kehadiran investor. Melalui kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit, warga dibuai harapan baru dari petani menjadi karyawan perkebunan sawit atau setidaknya disebut sebagai "petani berdasi". Dengan demikian, warga Kecamatan Kuripan akan memiliki peluang bekerja di tempatnya sendiri di perusahaan perkebunan sawit yang tentu saja sebelumnya mereka bersedia menjual lahan untuk dijadikan perkebunan. Jika bekerja di perusahaan sawit, mereka akan mendapatkan gaji tetap, jaminan kesehatan, berdiri koperasi dan berbagai kemudahan yang mengikutinya.

Selain itu terbuka akses darat yang dibuat oleh perusahaan sawit sehingga warga pun dapat memanfaatkan jalan darat tersebut sebagai penghubung antar desa, bahkan dari desa menuju ibukota Kabupaten. Atas dasar itulah, beberapa desa kemudian menyatakan kesediaan menjual lahan, menjadi petani plasma, kemudian bekerja sebagai buruh/karyawan sawit. Namun anehnya penduduk desa Jambu Baru tidak bersedia kawasan desanya dijadikan areal perkebunan sawit.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun demikian di areal desa Jambu Baru sendiri terdapat lokasi perusahaan perkebunan sawit yang kepemilikannya berganti-ganti. Setidaknya ada dua perusahaan yakni PT Citra Putra Kebon Asri (CPKA) yang beroperasi sekitar tahun 2008.

Foto 10 Lahan PT CPKA, PT TBM, PT PAs



Peta koleksi Marahalim Siagian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan peta di atas, terdapat tiga perusahaan yang beroperasi dan PT CPKA paling terdekat dan berada di wilayah Kecamatan Kuripan. Jika mengikuti peta tersebut maka semua desa dalam wilayah Kecamatan Kuripan adalah areal perkebunan kelapa sawit, sedangkan PT TBM dan PT PAS berada dalam wilayah Kabupaten Tapin. Namun agaknya, keberadaan PT CPKA tidak berumur panjang dan digantikan dengan PT Tasnida Agro Lestari (TAL) pada tahun 2008. Maka bergantilah peta lahan dari PT CPKA menjadi PT TAL.

Masuknya PT TAL sebagai pengganti PT CPKA melakukan gerakan agresif baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara tidak langsung adalah pihak Kecamatan tertanggal 29 Februari 2019 mengirimkan surat yang ditujukan kepada seluruh kepala desa dalam wilayah Kecamatan Kuripan yang isinya tidak membolehkan warga membuat sumur/beje pada areal perkebunan inti kelapa sawit. PT TAL sendiri, bulan Mei 2010, mengirimkan surat kepada kepala desa Jambu Baru untuk memasang patok kebun kelapa sawit. Perusahaan dibantu pemerintah Kecamatan melarang warga untuk tidak membuat sumur atau beje. Boleh jadi dari sudut pandang perusahaan adalah menghindari upaya ganti rugi yang berlebihan. Namun sebaliknya, melarang warga desa mana pun membuat sumur sebagai lahan untuk bekerja dan sudah turun temurun di padang, sebenarnya adalah pengingkaran terhadap budaya masyarakat yang hidup di lahan pasang surut. Sumur tersebut hanyalah perangkap ikan dengan memanfaatkan kondisi air pasang surut, bukan sebagai perangkap bagi perusahaan yang ingin membayar ganti rugi. Maka berapa pun bayarannya, istilah ganti rugi bahkan ganti untung sekalipun dapat menimbulkan kerugian bagi warga setempat.

Berikut ini surat-surat menyurat terutama yang dikirimkan pihak perusahaan dan Camat Kuripan ditujukan kepada kepala desa Jambu Baru.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 2 Surat Menyurat Perusahaan Perkebunan Sawit dan Camat Kuripan Kepada Kades Desa Jambu Baru

No	Tanggal	Nomor Surat	Hal	Pengirim	Tujuan
1	23 Mei 2009	-	Undangan menghadiri kunjungan rombongan BPN	Estate Manajer PT CPKA	Kades Jambu Baru
2	6 Mei 2010	045/TAL/IV/ BRH/2010	Pemberitahuan Rencana Pemasangan Patok Kebun	Estate Manajer PT TAL	Kades Jambu Baru
3	6 April 2010	018/TAL/IV/ BLH/2010	Rincian Biaya Tali Asih	Humas PT TAL	Kades Jambu Baru
4	15 Februari 2013	009/TAL-BRTE/II/2013	Undangan Rapat Pembentukan KUD Manuntung	Estate Manajer dan Humas PT TAL	Kades Jambu Baru
5	28 Januari 2013	03/TAL-BRTE/I/2012	Permohonan Sosialisasi	Humas PT TAL	Kades Jambu Baru
6	31 Januari 2013	05/TAL-BRTE/I/2012	Permohonan Sosialisasi	Humas PT TAL	Kades Jambu Baru
7	23 Oktober 2013	11/TAL/X/2013	Undangan Re-Sosialisasi	Manajemen PT TAL	Kades Jambu Baru
8	3 November 2008	141/213/KRP	Pendaftaran Plasma Perkebunan Sawit	Camat Kuripan	Kades se Kecamatan Kuripan
9	29 Februari 2010	523/027/KRP	Larangan Membuat Sumur Baru	Camat Kuripan	Kades se Kecamatan Kuripan

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jambu Baru

Dari surat menyurat baik dari perusahaan, maupun pemerintah Kecamatan sebagaimana tabel di atas, jelaslah pola hierarki yang terjadi adalah menempatkan warga atau masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

desa sebagai obyek dari kegiatan perusahaan. Sehingga posisi warga tersubordinat sebagai menerima program dari pihak perusahaan yang dibantu oleh pemerintah. Tentu bagi warga yang berpikir jauh ke depan terutama tentang ekologi, ekonomi, hingga dari sisi psikologi sangat berat menerima apa pun yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Di sisi lain, kejadian ini seperti bentangan benang merah sebagaimana perebutan lahan di Riau antara masyarakat dan perusahaan besar bahwa negara begitu pemurah memberikan kepada orang lain sebuah tanah yang begitu luas, yang luasannya lebih dari sepuluh kali luas Kota Yogyakarta. Sementara itu di waktu yang lain, masyarakat tertentu harus berdarah dan bercucuran air mata hanya sekedar untuk mempertahankan "sejengkal tanah" yang dikuasainya (Salim, 2017, p. 108).

Selain itu bergantinya perusahaan beroperasi di lahan HGU yang sama seperti di daerah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi terhadap Suku Anak Dalam 13. Di tempat itu nama perusahaan berubah-ubah entah berganti nama atau karena areal perkebunan dijual kepada perusahaan lain. Kondisi demikian membuat konflik yang tengah dimediasi tahap kedua gagal karena PT Asiatic Persada selaku pemilik saham menjual saham kepada PT. AMS sehingga memutus mata rantai kewajiban PT Asiatic Persada untuk taat pada proses media, dan memutuskan kewajiban PT Asiatic Persada terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan dalam proses perundingan yang tengah berjalan (Zakaria, et al., 2017, p. 31). Berkaca pada kondisi demikian, penting untuk melihat dinamika internal perusahaan termasuk juga alih perusahaan ini menjadi alasan untuk berkelit dari kewajiban atau kesepakatan dengan warga maupun pemerintah setempat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 8

AKSI PENCEGAHAN

SUMUR *NOT FOR SALE*

PT TAL sebagai pengganti PT CPKA sebelum menggarap lahan di perbatasan desa Jambu Baru, telah melakukan beberapa kali pendekatan. Tertanggal 6 April 2010, pihak perusahaan mengirimkan surat yang ditandatangani humas dan diketahui oleh Estato Manajer ditujukan kepada kepala desa Jambu Baru. Isi surat tersebut berkenaan dengan tali asih sumur ikan dan tanaman purun yang mencantumkan nominal biaya untuk tali asih tersebut. Berikut ini biaya yang tali asih yang diajukan pihak PT TAL sebagaimana surat nomor 018/TAL/IV/BLH/2010 tanggal 6 April 2010 yang dikirimkan Humas PT TAL Kepada Kades Jambu Baru

Tabel 3 Biaya Tali Asih Lahan

No	Tali Asih Lahan	Biaya	Keterangan
1	Sumur	Rp 750.000,-	Ukuran sumur per buah tanpa melihat besar kecil
2	Kebun Purun		Harga per hektar
	Baik	Rp 2.250.000,-	
	Kurang baik	Rp 1.250.000,-	
	Tidak baik	Rp 600.000,-	
3	Sungai	Rp 5.000.000,-	Per buah
4	Simpang atau saka	Rp 850.000,-	Per buah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pernah diadakan pertemuan dengan PT TAL dan warga menyampaikan biaya tali asih dengan harga yang sangat tinggi yakni Rp 10 juta rupiah untuk satu buah sumur, sedangkan PT TAL hanya mengajukan biaya Rp 750 ribu per sumur. Tingginya nominal angka diajukan warga sebenarnya sebagai bentuk penolakan halus, sehingga tidak mungkin disanggupi oleh pihak perusahaan apalagi jika mengganti sumur warga yang jumlahnya ratusan buah. Sebaliknya dari deretan angka yang ditawarkan pihak perusahaan, menunjukkan betapa besarnya pengorbanan warga desa jika menjual aset mereka. Andai tali asih sumur diterima dengan harga sebagaimana tertera akan sangat tidak sebanding dengan pendapatan dari panen ikan setiap musim kemarau (*manyahar sumur*). Meskipun sumber mata pencaharian tahunan, tetapi kepemilikan sumur oleh warga adalah turun temurun dan sangat mendukung perekonomian warga. Oleh karena itu, setiap *kubali* (kepala keluarga) ada yang memiliki beberapa buah sumur.

Begitu juga dengan kebun purun dihargai secara per hektar, padahal purun memiliki masa produktif tidak hanya dipanen pada musim kemarau, juga pada musim air atau musim hujan. Terhadap tiga klasifikasi kebun purun yang dibuat oleh perusahaan: baik, kurang baik, dan tidak baik sebagai upaya untuk menekan harga serendah mungkin demi kepentingan pihak perusahaan. Begitu pula dengan sungai dengan harga tertinggi yakni Rp 5 juta, maka jika menjual sungai berarti mematikan usaha warga sebab di situlah akses untuk pulang pergi bekerja dari desa ke padang dan sebaliknya, dari padang ke desa. Harga yang ditawarkan itu sangat luar biasa murah, sebab jika terjual, maka matilah usaha mencari purun, mencari ikan di sumur, mencari galam, berburu dan lain sebagainya. Sungai bagi warga sebenarnya tidak hanya akses untuk bekerja juga semacam jalan raya di daratan, karena sungai yang produktif menghasilkan keuntungan ekonomi bagi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

desa. Keuntungan itu didapatkan dengan istilah *cukai sungei* (pajak sungai) yang diserahkan oleh pembeli batang galam berdasarkan jumlah tebangan galam kepada salah seorang warga yang mengelola keuangan sungai. Dengan adanya dana yang dikumpulkan dari *cukai sungei* tersebut menjadi kas warga desa yang digunakan untuk kepentingan publik seperti biaya pembangunan masjid, membersihkan lapangan sepakbola, membeli keperluan alat kematian dan berbagai keperluan lainnya.

Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2013, PT TAL dua kali mengirimkan surat kepada kepala desa Jambu Baru yakni pada tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 31 Januari 2013 isi surat tersebut sama yakni permohonan sosialisasi. Hasilnya sama: warga tidak sepakat lahannya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, tetapi PT TAL melakukan cara dengan potong kompas yakni mengirimkan undangan ditujukan kepada kepala desa Jambu Baru pada tanggal 15 Februari 2013 untuk mengundang kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, LMP dan 3 perwakilan warga menghadiri sosialisasi pada Rabu, 20 Februari 2013 tentang rapat pembentukan pengurus baru KUD Manuntung dan membahas kebun plasma masyarakat. Inilah yang dikatakan potong kompas, sebab warga tidak bersedia lahannya digarap, perusahaan malah melakukan lompatan bahasan tentang koperasi dan kebun plasma.

Dalam kesempatan-kesempatan sosialisasi oleh perusahaan ke desa, menurut Ruji pihak perusahaan menggunakan dalih ingin menyejahterakan masyarakat melalui usaha perkebunan sawit. Ia pun menjawab, bahwa kalau sejahtera tentu semua masyarakat ingin demikian. Persoalannya apakah perusahaan berani menjamin pasti sejahtera? Seandainya gagal maka hilanglah mata pencaharian warga yang rata-rata bekerja di lahan itu.

Kesempatan lain, pihak humas perusahaan melakukan sosialisasi kepada warga desa sebagaimana tawaran untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memasukkan warga sebagai anggota koperasi. Penulis dalam kesempatan itu turut hadir, mengatakan bahwa tekad bulat masyarakat agar tidak ingin ada perkebunan kelapa sawit di daerah Jambu Baru. Namun penulis menawarkan solusi, mengingat lahan desa Jambu Baru masih belum terjamah perkebunan sawit, artinya warga masih bisa mencari ikan, tersedia pohon galam yang bahkan bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar. Maka penulis mengajukan usul simbiosis mutualisme dengan perusahaan tersebut, bahwa masyarakat desa Jambu Baru siap menyuplai ikan, galam, dan berbagai jenis potensi untuk kebutuhan karyawan perkebunan sawit. Dengan demikian, pihak perusahaan mendapatkan berbagai keperluan dari desa terdekat, sedangkan warga atau masyarakat desa Jambu Baru dapat menjual hasil alam di padang kepada pihak perusahaan.

Main Kucing-Kucingan

Ketika cara sosialisasi masih tidak berhasil, PT TAL kembali mengirimkan surat undangan re-sosialisasi tanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada kepala desa Jambu Baru mengenai pembebasan lahan warga, serta plasma perkebunan masyarakat. Agaknya surat tersebut merupakan upaya terakhir secara resmi dilakukan pihak perusahaan, sehingga kemudian PT TAL tidak beroperasi di desa Jambu Baru tetapi menggarap desa tetangga yakni Balukung Kecamatan Bakumpai, tetapi persoalan dimulai dari sini karena rupanya PT TAL beroperasi di daerah perbatasan desa Jambu Baru dan desa Balukung.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 11 Menuju Ruang Pertemuan DPRD Batola



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Merasa mendapat legitimasi menggarap lahan di kawasan desa Balukung, maka PT TAL secara diam-diam beroperasi di daerah perbatasan Balukung dan menyerobot kawasan Jambu Baru. Istilah batas itu bukan secara resmi dikeluarkan negara, melainkan batas yang menjadi kesepakatan bersama antar warga di kedua desa tersebut. Adapun batas resmi dari negara hingga sekarang belum terbit. Oleh karena aksi penyerobotan lahan itulah, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi yang digarap PT TAL. Berikut catatan kronologi yang dibuat oleh warga dan dibacakan dalam pertemuan dengan pihak DPRD Batola pada hari Rabu 17 Juli 2019.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> PT TAL beroperasi di desa Balukung Kecamatan Bakumpai telah melakukan aktivitas pembukaan lahan di areal wilayah atau perbatasan desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan. Warga desa telah melakukan beberapa kali upaya menghentikan aktivitas tersebut sebagai berikut.
>
> Kejadian pertama, 24 September 2018. Pada saat itu telah disepakati secara lisan bahwa pihak perusahaan tidak akan menggarap lahan di beberapa lokasi/blok E77, E78, E79, E80, E81, kemudian F78b, F79 .
>
> Kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, ternyata PT TAL menyalahi kesepakatan lisan karena beraktivitas di kawasan blok E77, E78, F78b, F79, maka warga desa Jambu Baru mendatangi lokasi tersebut dan meminta operator *himek* (ekskavator) untuk berhenti bekerja.
>
> Ketiga, Ahad tanggal 30 Juni 2019, pihak PT TAL kembali melakukan aktivitas di lokasi yang sama dan warga kembali meminta perusahaan berhenti beraktivitas.
>
> Sebelum kejadian ini telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara pemerintah desa dan warga Jambu Baru dengan pihak perusahaan PT TAL. Warga baik secara terang-terangan maupun secara halus menyatakan penolakan jika aktivitas perusahaan dilakukan di kawasan desa Jambu Baru. Semestinya sikap warga tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk tidak secara sembarangan beraktivitas baik di sekitar perbatasan desa apalagi dalam wilayah desa Jambu Baru.

Meskipun warga melakukan penolakan dengan mendatangi langsung operator ekskavator untuk menghentikan kerja, dan selama tiga kali dilakukan, warga memiliki kesadaran tinggi untuk menghindari tindakan destruktif atau anarkis. Merasa berulang kali aksi penyerobotan dilakukan PT TAL, kemudian pemerintah desa mencoba melakukan komunikasi dengan pihak Kecamatan dengan surat resmi dan hasilnya nihil, warga pun akhirnya mendatangi DPRD Batola dan inilah yang kemudian dinamakan gerakan Laung Bahenda.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB
9

GERAKAN LAUNG BAHENDA

Mengapa Laung Bahenda?

Umumnya berbagai gerakan menggunakan simbol tertentu untuk menggelorakan semangat mereka, sekaligus memberikan ikatan sebagai satu kelompok yang sama, hal tersebut dapat dilihat misalnya mahasiswa menggunakan baju almamater dengan warna sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus mereka. Hal yang sama juga pada gerakan massa di berbagai belahan dunia, seperti demonstran di Hongkong menggunakan ciri khas payung. Payung tidak hanya berguna menghalau hujan. Benda ini menjadi simbol gerakan yang kuat di Hong Kong dan mengubah jalan unjuk rasa pada tahun-tahun selanjutnya. Gerakan yang dimulai pada 28 September 2014 ini terus menaruh jejak hingga demonstrasi yang terjadi saat ini (Agustin, 2019). Di Perancis, unjuk rasa mengenakan rompi kuning. Kelompok rompi kuning beranggotakan orang-orang yang tinggal di pinggiran kota. Dalam unjuk rasa mereka melebur bersama kelompok kelas menengah dan kelas pekerja Prancis yang menyampaikan frustrasi mereka mengenai standar hidup mereka yang menurun (Sekarwati, 2019). Di Thailand, sejak lama berlangsung kudeta secara sporadis, para demonstran menggunakan simbol warna kaos merah dan kuning

> Kantor berita Prancis mengutip polisi yang mengatakan sekitar 15 ribu "Kaos Merah" - gerakan dibalik protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu tahun 2010

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> - berkumpul di dekat Monumen Demokrasi di Bangkok, menyerukan pembebasan 18 pemimpin mereka yang dipenjara sejak tahun lalu. Di dekatnya, nasionalis "Kaos Kuning" juga menggelar unjukrasa, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva atas penanganan sengketa lama perbatasan dengan Kamboja (Anonim, 2011).

Adapun mengenakan *laung bahenda* (*laung*/penutup kepala kuning) bukan sembarang pilih warna dan aksesoris penutup kepala tersebut. Ada beberapa alasan digunakan *laung bahenda* antara lain. Pertama, warna *bahenda* (kuning) adalah warna familier digunakan warga bahkan berkaitan hal-hal bersifat sakral. Misalnya pada orang yang meninggal dunia dan dikeramatkan warga, maka dimakamnya diletakkan kain kuning. Bahkan ada warga yang menaruh kain kuning tersebut pada pohon tertentu di tepi sungai Barito.

Foto 12 Kain Kuning di Pohon Tepi Sungai Barito



Foto Inas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto di atas menunjukkan kain kuning diletakkan di pohon tepat berada tepi sungai Barito di hulu desa Jambu Baru. Dari kain yang warna kuningnya sudah memudar menunjukkan warga telah sejak lama meletakkan kain di pohon tersebut. Atas dasar itulah, kain berwarna kuning merupakan kesepakatan tak terlisankan sejak dulu oleh warga untuk digunakan pada tempat tertentu. Konon kain kuning diletakkan pada pohon tersebut dimulai dari orang per orang, yang awalnya ada warga dari desa sekitar jika keinginannya terlaksana maka ia akan meletakkan kain kuning di pohon tersebut. Meski tidak jelas siapa yang memulai terlebih dahulu, tapi lama kelamaan semakin banyak kain kuning menyelimuti pohon tersebut.

Kedua, terkait *laung bahenda*, menurut Ni Ucu Marfuah lazim digunakan pada berbagai ritual seperti *batatenga* (memberikan sesaji), upacara badewa upacara penyembuhan sebagai ciri khas Dayak Bakumpai, atau meskipun berbeda secara lebih luas sebagaimana upacara *balian* yang dilakukan oleh orang Dayak Meratus (Budhi, 2018). Sehingga menguatkan bahwa kain kuning, kemudian *Laung Bahenda* memang dilakukan pada kegiatan yang sakral. Selain itu, masih menurut Ni Ucu Marfuah (75 tahun) kain kuning juga dipakai pada *tuyang* (ayunan anak kecil) yang sakit. Ketiga, *laung bahenda* selain digunakan untuk ritual, merupakan simbol dari suatu gerakan massa.

> "Gerakan protes yang menggunakan simbol identitas Bakumpai Laung Bahenda, tidak bisa kita anggap remeh. Sebab Laung Bahenda merupakan simbol membangkitkan semangat sekaligus solidaritas sesama ije lebu (satu desa) dan sesama uluh itah (etnis)," ucap antropolog FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Setia Budhi kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Rabu (24/7/2019) (Husaini, 2019)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 13 Ibu-ibu Berpartisipasi Membuat Laung Bahenda



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Keempat, alasan praktis dan ekonomis, sebab dengan menggunakan ikat kepala dari kain kuning mudah dipakai dan dilepaskan oleh penggunanya. Berbeda dengan menggunakan atribut baju, rompi bahkan payung memerlukan biaya besar bagi para penggunanya. Maka cukup dengan selembar kain beberapa meter, tanpa mengurangi aspek kesakralan dapat dipotong-potong menjadi beberapa bagian dijadikan ikat kepala.

Oleh karena itu, penggunaan simbol kultural apalagi berlatar belakang etnisitas tertentu, termasuk Bakumpai sebagai sub etnis Dayak Ngaju, versi lain Ot Danum (Nasrullah, 2014) tidak boleh asal pakai. Penggunaan simbol oleh pelaku kebudayaan mesti melihat dengan jelas dan jernih berdasarkan asal usul suatu suku bangsa tersebut, peta kebudayaan, dan penggunaan tersebut memang telah dilakukan secara terus menerus di suatu daerah. Menggunakan suatu simbol tertentu untuk kemudian dianggap sebagai suatu kesakralan, tanpa melihat kesesuaian obyek tempatan atau kecocokan suatu lokasi hanya akan membuat penggunaan simbol sebagai komoditas tertentu atau paling rendah sebagai aksesoris belaka.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dengan demikian, penggunaan simbol kain kuning yang diikat kepala, disebut sebagai Laung Bahenda adalah pilihan tepat yang berlaku di daerah dan di masyarakat tersebut terutama bagi orang Bakumpai dan sebenarnya tidak hanya di desa Jambu Baru, juga bagi orang Bakumpai di daerah lain terutama sepanjang daerah aliran sungai Barito atau menyebar di wilayah Tumbang Samba, Kalimantan Tengah dan Long Iram, Kalimantan Timur sebagai daerah diaspora (Budhi, 2017) penyebaran orang Bakumpai itu, terutama di kawasan Tumbang Samba, disebabkan karena perdagangan maupun upaya untuk berjuang (Hadi, 2015). Itulah sebabnya, orang Bakumpai identik ekologi sungai, Maka ketika Laung Bahenda digunakan secara kultural historis, *social memory*, hingga *social knowledge* warga segera terjalin dalam pemahaman yang sama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 10

DIALOG DAN DEBAT

Gerakan Laung Bahenda sebagai gerakan sosial bukan sebagaimana gerakan yang mengutamakan kekuatan jumlah massa, aksi perang urat saraf atau bahkan tindakan destruktif dan intimidasi tapi cenderung dilakukan dengan cara sangat terpelajar yakni melakukan dialog. Pihak pertama yang dituju adalah wakil rakyat Batola, sehingga untuk terwujudnya audiensi dan dialog mereka membutuhkan tahapan atau prosedur administratif seperti mengirimkan surat permohonan dan komunikasi yang intensif untuk memastikan jadwal pertemuan. Selama Gerakan Laung Bahenda dilakukan telah berlangsung tiga kali audiensi, diskusi dan perdebatan. Dialog pertama, warga mendatangi kantor DPRD Batola dan ditemui sejumlah wakil rakyat dan secara resmi pertemuan dibuka oleh ketua DPRD Batola, Hikmatullah. Pada pertemuan itu, mereka mendengarkan keluhan warga dan memberikan tanggapan yang secara teknis akan dilakukan dialog lagi yang mengundang pihak pemerintah. Dialog kedua, selain warga dan wakil rakyat, juga diundang bagian tata pemerintahan pemerintah Kabupaten Batola dan benar juga wilayah antar dua desa dan dua Kecamatan yakni Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan dan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai belum memiliki batas administrasi. Ketiga, pertemuan antara warga desa, wakil rakyat dan pihak Humas PT TAL berakhir dengan kesepakatan bersama dengan tanda tangan di atas materai.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keempat, para pihak yang berperan dalam proses membantu gerakan Laung Bahenda. Empat bagian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Dialog Pertama: Mempertahankan Warisan Turun Temurun

Sebelum dialog diadakan, perwakilan warga Jambu Baru terlebih dahulu mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD Batola untuk meminta adanya pertemuan tentang keluhan masyarakat terhadap PT TAL yang beroperasi di desa Balukung dan memasuki wilayah desa Jambu Baru. Selain itu, warga desa melakukan pertemuan sehari sebelumnya untuk merancang tuntutan diketik di atas kertas dengan tujuan agar disampaikan dalam dialog sudah diketahui warga dan disampaikan secara sistematis.

Keaktifan warga desa berpendapat dan diskusi seolah seperti suasana akademis tetapi lokasinya dipindahkan ke sebuah rumah di desa. Sejumlah tokoh masyarakat dan *pambakal helu* (mantan kepala desa) juga diundang untuk memberikan kesaksian terkait keberadaan perusahaan. Akhirnya setelah dirasa cukup, maka kemudian diketiklah pernyataan bersama tersebut dan ditandatangani oleh kepala desa serta ketua BPD desa Jambu Baru.

Keesokan harinya, yakni Rabu 17 Juli 2019, berangkatlah rombongan warga menuju kota Marabahan. Warga yang menggunakan *laung bahenda* atau ikat kepala kuning menggunakan sepeda motor melewati badan jalan yang menghubungkan desa Jambu Baru dan desa Balukung. Jalan seadanya tersebut dan kebetulan saat itu musim kemarau membuat warga terbantu perjalanannya mencapai kota Marabahan. Begitu sampai di desa Balukung, warga menyeberang menggunakan feri dan lalu melewati wilayah desa Balukung kemudian menyusuri jalan darat areal perusahaan perkebunan sawit PT Barito Putera Plantation yang tembus ke anjir Talaran lalu terhubung hingga ke kota

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Marabahan. Rute ini dilewati selama tiga kali pertemuan di Gedung wakil rakyat Batola.

Foto 14 Kepala Desa Jambu Baru Menyampaikan Maksud Warga untuk Berdialog Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Batola



Foto koleksi tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Sesampainya di Gedung DPRD Batola, sejumlah warga mengenakan *laung bahenda* rupanya menunggu giliran karena pada hari yang sama warga dari Kecamatan lain juga mengadukan persoalan internal mereka dengan pihak perusahaan perkebunan sawit lainnya. Giliran warga Jambu Baru memasuki gedung pertemuan dan melakukan dialog. Ketua DPRD Batola periode 2014-2019, Hikmatullah membuka secara langsung pertemuan tersebut dan setelah itu memberikan kuasa kepada komisi III DPRD Batola, Syarif Faisal untuk memimpin diskusi.

Dialog pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2017, berbagai media massa *online* menampilkan berita tersebut. Salah satunya media *Jejak Rekam* menurunkan berita berjudul "Tolak Sawit, Pakai Laung Kuning, Warga Desa Jambu Baru Datangi DPRD

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Batola" maka sejak itulah gerangan Laung Bahenda menjadi identik dengan aksi penolakan warga desa Jambu Baru.

Secara teknis, setelah dibuka ketua DPRD Batola dan kemudian dilanjutkan oleh Syarif Faisal sebagai pimpinan sidang, maka kepala desa Jambu Baru memberikan pengantar tentang maksud dan keinginan warga. Maka secara bergantian tiga orang perwakilan warga yakni Halidi, Asliannor dan Nasrullah menyampaikan keluhan atau pengaduan warga yang sudah tertuang dalam pernyataan yang telah dibuat dan juga dibagikan kepada wakil rakyat. Pernyataan yang semakin menguatkan adalah hadir di pertemuan tersebut tiga kepala desa Jambu Baru, pejabat saat ini, Wirdansyah, kemudian secara berturut-turut Asliannor, dan Asrani keduanya mantan kepala desa Jambu Baru pada periode yang berbeda dan secara berkesinambungan. Testimoni mereka bahwa tidak ada kesepakatan antara pemerintah desa baik dengan perusahaan atau pemerintah Kabupaten Batola bahwa lokasi desa Jambu Baru digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit baik PT TAL maupun perusahaan lain sebelumnya.

Salah satu media on line menurut berita dari liputan dialog pertama tersebut.

> Dalam dialog dengan perwakilan warga Desa Jambu Baru langsung ditemui Ketua DPRD Batola, Hikmatullah didampingi Ketua Komisi III DPRD Syarif Faisal dan Ketua Komisi I DPRD Batola, Mahrus Effendi.
>
> Menurut Halidi, pengalaman Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai, saat di kawasan itu berdiri perusahaan sawit PT TAL, justru tidak ada perkembangan signifikan terhadap kehidupan masyarakatnya.
>
> "Lebih baik kami memberdayakan sumber daya alam kami sendiri daripada di desa kami ada beroperasi perusahaan sawit. Sebab, pekerjaan yang kami geluti seperti merotan, berkebun dan bertani sudah berkecukupan. Pekerjaan ini kami warisi secara turun temurun," tegas Halidi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Menurut dia, jika dilihat dari batas desa, maka Desa Jambu Baru juga akan turut dirambah PT TAL. Bahkan, ada beberapa perwakilan perusahaan yang berusaha membuka lahan. "Yang pasti, kami menolak lokasi itu digarap. Ini berdasar hasil kesepakatan warga Desa Jambu Baru, apalagi tidak ada niat baik dari PT TAL," cetus Halidi.
>
> Menurut dia, akibat tidak ada niat baik dari PT TAL, terkesan main kucing-kucingan untuk menyerobot lahan di Desa Jambu Baru. Atas dasar itu, Halidi bersama warga lainnya menegaskan lebih baik memilih sejahtera tanpa perkebunan sawit.
>
> "Makanya, kami meminta pimpinan dan anggota DPRD Batola untuk mendesak Bupati Batola untuk menjalankan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.
>
> Terutama, dalam diktum kedelapan angka dua berbunyi melakukan pengumpulan data pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah Kabupaten yang diusahakan badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup peruntukan, luas tanam dan tahun tanam," beber Halidi.
>
> Dalam hal ini, masih menurut dia, kawasan perkebunan sawit PT TAL beroperasi di Desa Balukung berbatasan dengan Desa Jambu Baru. Ia menegaskan batas Desa Jambu Baru dan Desa Balukung secara keseluruhan dari ujung berbatasan Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, hingga Sungai Barito.
>
> "Perbatasan dua desa ini hanya terpisah tanggul PT TBM, garis lurus hingga Sungai Punggu, anak Sungai Barito," beber Halidi (Asyikin, 2019b).

Dari pernyataan tersebut ada tiga hal penting yang dapat dijadikan catatan. *Pertama*, warga cukup dengan pekerjaan yang ada. Dengan kata lain, pekerjaan utama seperti mencari ikan, mencari atau menebang pohon galam, mencari rotan, atau bahkan berkebun adalah pekerjaan yang memberikan berbagai variasi dan dapat dilakukan secara silih berganti. Kata "cukup" berarti tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam yang ada di daerah padang, apalagi mengonversi semuanya kepada tanaman yang bersifat monokultur sebagaimana adanya perkebunan sawit yang menepikan aktivitas atau pekerjaan lain. Kalkulasi pendapat sehari-hari secara 'hitung dagang' atau hitung kasar saja telah menunjukkan bagaimana pekerjaan turun temurun tersebut mampu menghidupi warga, sehingga pilihan kata "sejahtera tanpa perkebunan sawit" sebenarnya rasionalitas warga desa yang telah terbukti selama ini.

Kedua, warga menganggap PT TAL main kucing-kucingan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tiga kali warga menghentikan aktivitas ekskavator PT TAL yang menyerobot wilayah desa Jambu Baru, keberulangan tersebut dianggap warga sebagai upaya pihak perusahaan yang memanfaatkan kelengahan warga jika tidak sedang bekerja di sekitar kawasan tersebut. Tentu saja atas akibat aksi penyerobotan tersebut bagi warga sangat berdampak negatif sebagaimana tertuang dalam surat penolakan warga yang dibacakan di hadapan anggota dewan atau anggota DPRD Batola, bahwa:

> Aktivitas PT TAL membuka lahan tersebut tidak memedulikan permintaan masyarakat sebagaimana penjelasan di atas yang berdampak negatif yakni:
>
> 1. Terjadi kerusakan lingkungan akibat pohon galam disapu-bersih oleh ekskavator, kemudian sirkulasi air akan terganggu karena adanya saluran air yang dibuat PT TAL.
> 2. Warga desa Jambu Baru resah akibat aktivitas perusahaan yang mengganggu lahan kerja tersebut.
> 3. Menurunnya penghasilan warga akibat sulitnya mencari galam dan mencari ikan di daerah tersebut.

Ketiga, adanya payung hukum melalui inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan atau moratorium

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perkebunan sawit dapat menjadi acuan pemerintah daerah terutama Kabupaten Batola untuk meninjau ulang keberadaan PT TAL.

Selain itu, menjadi catatan penting dari Gerakan Laung Bahenda ini adalah tidak melakukan upaya permintaan uang pengganti dalam jumlah berapa pun. Sebab ganti rugi apalagi dalam bentuk uang hanya akan menyebabkan warga menjadi disorientasi dari tuntutan pembebasan lahan kepada kepentingan materi berupa uang. Pada akhirnya nanti justru akan berujung pada kepentingan sesaat dan bahkan akan membuat warga menjadi terbelah akibat tuntutan ganti rugi.

> Warga Jambu Baru sendiri tidak fokus kepada ganti rugi. Mereka menginginkan Jambu Baru bebas dari semua perkebunan sawit.
>
> "Tak hanya ganti rugi, ganti untung pun kami tidak mau. Kami hanya ingin lokasi tanpa sawit, sehingga semua warga bisa bekerja seperti biasa. Mulai dari mencari ikan dan bercocok tanam," tukas Nasrullah, salah seorang warga Jambu Baru (Alkaf, 2019a)

Foto 15 Tim Dialog Laung Bahenda



Foto Rudy

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dialog pertama itu, hanya melibatkan dua pihak yakni warga desa Jambu Baru atau kelompok Gerakan Laung Bahenda dengan pihak DPRD. Tanggapan positif pun disampaikan oleh wakil rakyat serta dari wakil Bupati Batola sebagai berikut:

> Syarif Faisal mengaku memahami kekawatiran warga, jika lahan yang ada itu digarap menjadi kebun sawit.
>
> "Tentunya akan berdampak dari mata pencarian warga. Sebab menggalam (mencari kayu Galam) dan mencari ikan, menjadi lebih sulit. Pendapatan 100-200 ribu per hari akan sulit didapat, jika kawasannya berubah fungsi," tandasnya.
>
> Menurut Syarif, untuk mencarikan solusi dari masalah warga. Maka sebelum pelantikan dewan baru, warga akan kembali diundang. Ia menegaskan permasalahan warga ini menjadi atensi dewan. (Rudy, 2019b).

Rupanya pada hari yang sama, pihak DPRD Batola menerima kedatangan masyarakat Batola dari berbagai daerah dengan masalah yang sama yakni sengketa perkebunan sawit. Aduan atau permohonan bantuan kepada DPRD, terkait permasalahan perusahaan sawit ini datang dari warga Jambu Baru Kecamatan Kuripan dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Makarti Jaya Desa Karya Makmur Kecamatan Wanaraya (Mubarak, 2019). Atas dasar itulah ketua Komisi III DPRD Batola, Syarif Faisal menyatakan "memang, keberadaan perusahaan sawit di Batola banyak dampak yang merugikan masyarakat. Seperti tidak terbukanya koperasi, penyerapan tenaga kerja dan perkebunan plasma yang tidak terawat. Ini belum lagi masalah klasik yang merugikan masyarakat," ucap Syarif, dalam dialog dengan puluhan warga Desa Jambu Baru di DPRD Batola, Marabahan, Rabu (17/7/2019) (Asyikin, 2019a).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dialog Kedua: Tidak Ada Tapal Batas

Setelah sukses pada dialog pertama yang menyampaikan keinginan warga desa Jambu Baru, maka dilanjutkan dialog kedua pada Senin tanggal 22 Juli 2019 untuk mendengarkan tanggapan pihak pemerintah terkait dan tetap mengundang warga desa Jambu Baru.

Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah memastikan legalitas batas desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan dan desa Balukung, Kecamatan Bakumpai. Sebab menurut sumber tertulis dalam surat resmi ditandatangani kepala desa dan ketua BPD Jambu Baru menegaskan batas desa belum ditetapkan secara resmi, sedangkan selama ini adalah patokan kebiasaan antar dua desa dan itupun telah melanggar batas kerja antara dua warga desa tersebut. Kata kebiasaan di sini menunjukkan kesepakatan bersama yang tidak dinyatakan dalam bentuk lisan atau dokumen tertentu, tetapi warga kedua desa menyadari ada garis imajiner yang jika mereka melewati maka akan ditegur warga desa lain.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 16 Berita Acara Musyawarah Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH
TENTANG BATAS DESA JAMBU BARU
SECARA ADMINISTRASI DAN WILAYAH KERJA

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti pertemuan dengan DPRD Batola tanggal 17 Juli 2019 tentang penolakan warga desa Jambu Baru terhadap aktivitas PT Tasnida Agro Lestari di wilayah desa Jambu Baru, maka dengan musyawarah ini memutuskan tentang batas desa secara administrasi dan wilayah kerja, sebagai berikut.

BATAS ADMINISTRASI

Batas desa Jambu Baru dan desa Balukung hingga sekarang tidak pernah ditetapkan, baik di masa kepala desa Asliannor sejak tahun 2000 hingga tahun 2015, hingga kepala desa Wirdansyah yang menjabat sejak tahun 2016 hingga sekarang. Oleh karena itu, jika ada batas desa Jambu Baru dan desa Balukung maka hal tersebut dilakukan tanpa sepengatahuan warga atau aparat desa Jambu Baru.

BATAS AREAL KERJA

Areal kerja PT Tasnida Agro Lestari merupakan wilayah desa Jambu Baru dengan alasan:

1. Patokan kami adalah kebiasaan antar dua desa yakni desa Jambu Baru dan desa Balukung bahwa batas dua desa ditandai batas kerja antar warga di daerah yang dinamakan Bundung terletak di simpang Jalemu.
2. Selain itu, warga Jambu Baru memiliki sungai Tabukan yang sudah dikeruk oleh pemerintah kabupaten dan ujungnya berbatasan kabupaten Tapin, sedangkan Palajau yang diklaim sebagai sungai, ujungnya hanyalah *tatas*. Jadi Palajau hanya sekedar *tatas* untuk mencari kayu, sedangkan Tabukan adalah sungai yang dirawat oleh warga Jambu Baru.
3. Oleh karena itu, warga desa Jambu Baru menganggap PT Tasnida Agro Lestari telah menyerobot (*mangakat*) wilayah desa Jambu Baru, sedangkan warga sejak menolak segala aktivitas perkebunan sawit.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambu Baru, 21 Juli 2019

Mengetahui
Kepala Desa Jambu Baru,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KECAMATAN ... KEPALA DESA JAMBU BARU

Wirdansyah
NIKD 6304112001

Ketua BPD Desa Jambu Baru,

DESA JAMBU BARU B.P.D. KEC. KUIN UTARA

Humaidi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pernyataan tertulis warga yang diketahui dalam bentuk tanda tangan dari kepada desa dan ketua BPD Jambu Baru menyatakan tidak ada batas desa secara administrasi atau ditentukan pemerintah setempat. Kalaupun seandainya telah ada upaya ke arah tersebut, ternyata berdasarkan pernyataan dua bahkan tiga kepala desa Jambu Baru pada periode berbeda menyatakan tidak pernah ditetapkan atau berkoordinasi dengan mereka. Terkait hal tersebut, Muliansyah, Kabag Tapem Setda Batola menyampaikan bahwa "Sebelumnya pada 2018, Balai Informatika Geospasial Pusat membuat dereminasi kartu metrik batas desa. Diketahui terdapat batas desa yang belum disepakati kedua belah pihak, termasuk Balukung dan Jambu Baru," imbuhnya. Atas dasar ketidakjelasan atau ketidakadaan batas resmi antar dua desa tersebut tersurat "Tentu kami menyesali bahwa pertemuan ini tidak menghasilkan apapun. Artinya batas desa yang dipermasalahkan masih tanpa kejelasan," tegas Basrin, anggota DPRD Batola dari Fraksi PDIP (Alkaf, 2019b). Keanehan ini terutama tindakan mengakses lahan desa Jambu Baru menimbulkan kecurigaan wakil rakyat.

> Menurut Syarif Faisal, berdasarkan penjelasan Muliansyah berarti tapal batas dua desa memang belum *clear* (bersih). Tapi anehnya, kenapa perusahaan sampai beraktivitas di lahan yang belum jelas statusnya.
>
> Karena itu, Syarif meminta agar pemerintah menghentikan sementara aktivitas PT TAL di lahan yang masih bersengketa, sampai masalahnya benar-benar tuntas.
>
> Selain itu, diminta juga kepada pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan tapal batas dua desa itu, agar masalahnya tidak berlarut-larut. (Rudy, 2019a).

Berkaitan dengan batas desa atau batas antar Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Bakumpai tentu akan sangat mustahil kalau dinyatakan ada, sebab sebagaimana pernyataan dalam berita acara musyawarah desa tersebut dinyatakan bahwa tidak ada batas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

desa sejak tahun 2000 hingga sekarang maupun sebelum tahun 2000. Maka kalaupun dinyatakan ada, berarti tanpa sepengetahuan warga atau pemerintah desa.

> Sementara Asliannoor yang juga mantan kades era 2000 – 2015 menegaskan, sejak menjabat kades selama tiga periode, masalah tapal batas ini belum pernah sama sekali diselesaikan. Begitu juga di era pemerintahan desa setelahnya.
>
> "Dulu Pemerintah Desa Jambu Baru pernah dianggarkan dana untuk penyelesaian tapal batas di dua desa. Namun beberapa kali dikonsultasikan ke Tapem (Setda Batola), selalu dijawab masih menunggu instruksi. Dan sampai habis masa jabatan saya, tidak juga diselesaikan," ungkapnya (Rudy, 2019a).

Kalau pun batas desa dibuat, tentu mengacu kepada peraturan Menteri dalam negeri seperti nomor 45 tahun 2016 (atau peraturan sebelumnya) tentang pedoman penetapan batas desa sebagaimana pasal 7 "anggota tim kepala desa/lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan tokoh masyarakat". Oleh karena itu, ketiadaan batas desa secara resmi berdasarkan peraturan pemerintah, berarti pihak perusahaan telah mengklaim sendiri dan melakukan penyerobotan terhadap areal wilayah Jambu Baru. Dengan demikian, aspek kultural dalam hal kebiasaan masyarakat telah dilangkahi oleh pihak perusahaan tersebut. Kemudian seperti gayung bersambut, sebab pernyataan bagian tata pemerintahan sendiri, batas resmi kedua desa Jambu Baru dan desa Balukung memang tidak ada.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 17 Hikmatullah Ketua DPRD Batola Periode 2014-2019 Membuka Dialog



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Batas Kecamatan, batas Kabupaten hingga batas provinsi baru dibahas dan sering kali menjadi persoalan manakala ada kepentingan yang bernilai ekonomi dari pihak ketiga, seperti korporasi yang membuka usaha. Sebelumnya, daerah seperti Kecamatan Kuripan tidak dilirik sebagai kawasan yang mendatangkan investasi, maka batas desa atau antar Kecamatan pun ikut terabaikan. Ketika segala sesuatu menjadi berharga, maka pihak tertentu bisa saja memanfaatkan kelengahan administrasi berupa batas desa tersebut, tindakan paling ugal-ugalan adalah kerjakan saja dulu, urusan administrasi belakangan. Akan lebih baik bila tidak ada protes masyarakat, ataupun jika protes dilakukan kelompok elit, maka negosiasi internal bisa dilakukan dengan cara *babenyeman* (diam-diam) atau *imadu si saran* (selesaikan di pinggir). Namun hal demikian tidak berlaku bagi desa yang aparat pemerintah dan warganya bersatu mempertahankan tanah meski sejengkal pun wilayah desa dari aksi main serobot dari pihak manapun.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagi perusahaan yang benar-benar serius membuka usaha di suatu daerah akan lebih baik jika melihat segala aspek secara komprehensif, tidak hanya sekedar mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU), juga melihat respon masyarakat, situasi kultural hingga membuat hal samar mnejadi hal terang benderang yakni batas desa secara resmi maupun yang berlaku di masyarakat. Pelajaran penting yang perlu dipetik, masih ada kesadaran masyarakat tentang teritorial desa mereka berdasarkan kesepakatan turun temurun, ataupun atas dasar keberlangsungan upaya warga melakukan perawatan pada suatu kawasan yang sering kali dibatasi oleh sungai. Upaya perusahaan melakukan deteritorialisasi barangkali atas klaim pihak tertentu, jelas merupakan upaya bukan hanya penyerobotan tetapi mengabaikan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Dialog Ketiga: Debat Panas dan Kesepakatan Menggantung

Setelah mendapatkan informasi bahwa tidak ada tapal batas yang jelas, pimpinan DPRD Batola kemudian mengundang pihak perusahaan dan mempertemukan dengan warga desa Jambu Baru. Dalam berita acara yang diketahui oleh Kepala Desa Jambu Baru dan ketua BPD Desa Jambu Baru disampaikan tiga permohonan:

1. Penjelasan tentang tahapan selanjutnya yang ditempuh oleh warga dan pemerintah desa Jambu Baru terkait penolakan terhadap PT Tasnida Agro Lestari.
2. Perlu ada keputusan tertulis yang mengikat para pihak atas tindakan PT Tasnida Agro Lestari tersebut.
3. Melalui DPRD Batola, kami memohon agar Hak Guna Usaha (HGU) PT Tasnida dicabut dari wilayah desa Jambu Baru.

Dalam dialog yang mempertemukan warga desa Jambu Baru yang mengenakan atribut *laung bahenda* dengan pihak perusahaan terjadi perdebatan sengit karena kedua belah pihak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

saling mengklaim kebenaran. Bahkan sebelum perdebatan dimulai, kelompok Laung Bahenda menanyakan kewenangan pihak perusahaan yang datang, terutama sebagai humas dari perusahaan. Pertanyaan paling mendasar adalah apakah mereka memiliki wewenang untung melakukan pengambilan keputusan. Namun diskusi yang menuju perdebatan tetap dilakukan dengan berbagai pertimbangan, terutama ada keputusan yang mengikat kedua belah pihak melalui pernyataan hitam di atas putih.

> Suasana dialog yang memanas sebenarnya sudah terlihat di awal-awal pertemuan. Saat itu, Inas sempat mempertanyakan wewenang bagian humas yang dikirim PT TAL, Subagyo dan Abdali, dalam hal pengambil keputusan.
>
> "Apa wewenang humas terhadap permasalahan ini. Apakah bisa memutuskan suatu masalah?. Kalau dari kami jelas bisa (mengambil keputusan). Sebab di sini ada unsur pemerintah desa dan BPD," tandas Inas.
>
> Menyambung komentar Inas, salah satu warga lainnya sempat menimpali, dengan mempertanyakan surat tugas keduanya agar tidak disebut ilegal.
>
> Menjawab itu, Subagyo mempersilahkan warga berasumsi demikian. Yang jelas, menurut dia, pimpinan perusahaan telah memerintahkan mereka menghadiri pertemuan.
>
> "Kita memang tidak membawa surat tugas. Tetapi kami langsung diperintah pimpinan secara lisan untuk hadir di sini. Dan kalau kami dianggap ilegal, silakan saja," ucap Subagyo.
>
> Syarif Faisal langsung menyela dengan mengatakan, keputusan yang disepakati peserta rapat semuanya adalah legal (Rd, 2019a).

Upaya warga menanyakan legalitas kedua utusan perusahaan tersebut untuk menghindari kemungkinan suatu saat bahwa pihak perusahaan merasa tidak terlibat dengan segala keputusan tersebut. Maka penegasan secara lisan pada awal diskusi hingga perdebatan itu guna memastikan perdebatan ini diwakili oleh juru

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bicara perusahaan atau mewakil perusahaan agar acara hari itu tidak sia-sia belaka.

Sementara puncak perdebatan terjadi karena pihak perusahaan merasa yang mereka lakukan masih berada dalam wilayah desa Balukung, sedangkan warga Gerakan Laung Bahenda menganggap pihak perusahaan telah memasuki desa Jambu Baru, apalagi diperkuat daerah perbatasan tidak ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Sehingga jika melihat patokan kebiasaan warga, maka operasionalisasi PT TAL telah menyerobot desa Jambu Baru.

> Dalam rapat ini mengemuka saling klaim, karena PT TAL menegaskan bekerja sesuai prosedur dan telah mengantongi izin dari Bupati Batola Hj Normiliyani Abrani Sulaiman sejak 23 Juli 2013 berupa empat sertifikat hak guna usaha (HGU) di atas lahan seluas 8.000 hektare.
>
> "Sebelum mendapatkan HGU, kami sudah penuhi segala persyaratan seperti izin usaha perkebunan, dan dokumen amdal yang disetujui Gubernur Kalsel," ucap Subagio.
>
> Namun, ia memastikan di atas lahan ribuan hektare itu tidak termasuk wilayah Desa Jambu, karena hanya ada di Desa Balukung dan Desa Banitan, Kecamatan Bakumpai. Sedangkan, proses pembebasan lahan sudah diberikan kepada warga dua desa berupa tali asih Rp 1 juta setiap kepala keluarga (KK).
>
> Klaim perwakilan PT TAL langsung ditepis warga Desa Jambu Baru. Mereka menunjuk jika sudah aktivitas pembersihan lahan yang merambah desanya, walau tak termasuk wilayah konsesi perkebunan sawit perusahaan itu. "Kami warga Desa Jambu Baru berkesimpulan PT TAL sudah merambah dan menggarap lahan di desa kami seluas 30 hektare," ucapnya (Asyikin, 2019c).

Alasan yang digunakan pihak perusahaan karena memiliki izin HGU dan alasan ini sebenarnya cara yang sama digunakan di tempat lain. Demikian pula di provinsi Riau, salah satu provinsi yang memiliki luas lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Akibatnya, masyarakat di sekitar lahan konsesi menderita kerugian. Lahan yang mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diambil secara sepihak oleh perusahaan untuk pengembangan produksinya. Puluhan ribu masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan perusahaan. Karena perusahaan dinilai memiliki legalitas yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah legalitas yang didapat oleh perusahaan sudah dilakukan tahapan secara benar atau belum (Peneliti, 2020, p. 5).

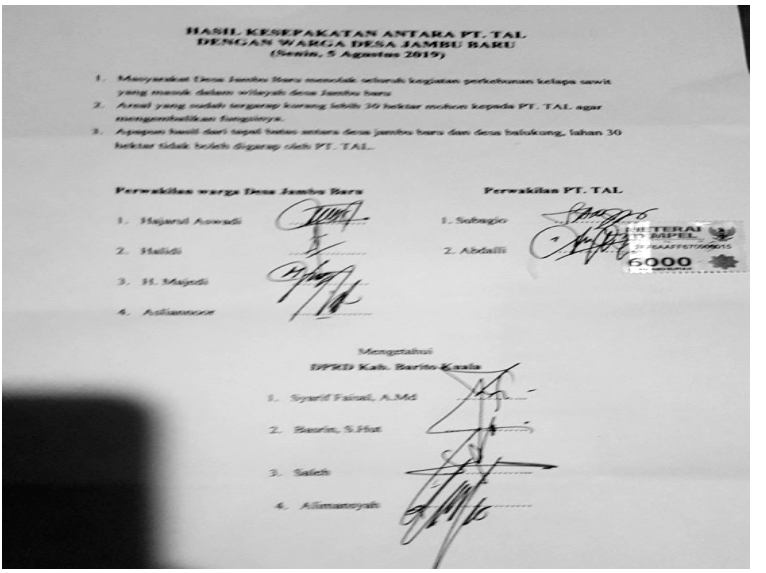
Itulah sebabnya, warga hanya mendapatkan informasi bahwa lahan perkebunan sawit tersebut telah memiliki HGU di atas tanah tempat mereka bekerja secara turun temurun. HGU tak ubahnya menerima durian runtuh tanpa harus memanjat pohon untuk memetik yang memberikan keberkahan bagi pihak perusahaan perkebunan, sedangkan bagi warga setempat yang kadang mereka seolah menerima nasib tanpa daya. Mereka tak ubahnya menerima kejatuhan meteor yang menghancurkan apa saja yang ditimpa batu dari luar angkasa itu. Fenomena seperti ini terjadi juga di Kalimantan Barat di kawasan perkebunan sawit yang sebenarnya sudah lama dikerjakan.

> Penguasaan tanah/lahan oleh PTPN XIII atau PT swasta menjadi salah satu sumber masalah dengan masyarakat lokal (Dayak dan Melayu) di Kalimantan Barat, juga sering menjadi sumber konflik yang berdasar pada masyarakat lokal melawan masyarakat pendatang. Tanah-tanah yang dulunya secara tradisi dikuasai oleh masyarakat lokal secara kolektif dan tidak tertulis kemudian bergeser menjadi kepemilikan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, kepemilikan oleh orang-orang kaya baru yang sanggup membeli tanah-tanah luas, dan kepemilikan secara individu dalam bentuk kapling-kapling yang semuanya dilegitimasi oleh sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh negara (Badan Pertanahan Nasional) (Brata, 2012).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hal ini pula terjadi salah satu desa di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, komunitas Desa Sarapat akhirnya tidak kuasa menolak kehadiran perkebunan sawit. Mereka ketakutan karena PT SGM memiliki sejumlah perizinan tertulis dari pemerintah daerah, dinas perkebunan dan kehutanan. Sementara masyarakat tidak memiliki surat bukti apapun sebagai pengakuan sah dari negara atas wilyah kelola masyarakat (Palupi, et al., 2015, p. 47). Beberapa catatan tersebut menunjukkan posisi warga negara berada pada posisi subordinat, sebab pihak perusahaan cenderung menggunakan kekuatan legalitas. Situasi ketidak berdayaan seperti ini berusaha didobrak oleh Gerakan Laung Bahenda agar masyarakat tidak begitu saja diperdaya. Sehingga meskipun pembahasan dialog menjadi alot tetapi akhirnya tercapai kesepakatan bersama dalam bentuk surat kesepakatan bersama antara pihak warga, perwakilan PT TAL dan diketahui oleh DPRD Batola

Foto 18 Kesepakatan Warga dan Pihak perusahaan


HASIL KESEPAKATAN ANTARA PT. TAL
DENGAN WARGA DESA JAMBU BARU
(Senin, 5 Agustus 2019)

1. Masyarakat Desa Jambu Baru menolak seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Jambu baru
2. Areal yang sudah tergarap kurang lebih 30 hektar mohon kepada PT. TAL agar mengembalikan fungsinya.
3. Apapun hasil dari tapal batas antara desa jambu baru dan desa balukung, lahan 30 hektar tidak boleh digarap oleh PT. TAL.

Perwakilan warga Desa Jambu Baru

1. Hajarul Aswadi
2. Halidi
3. H. Majedi
4. Asliannoor

Perwakilan PT. TAL

1. Sobagio
2. Abdalli

Mengetahui
DPRD Kab. Barito Kuala

1. Syarif Faisal, A.Md
2. Basrin, S.Hut
3. Saleh
4. Alimantoyah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tiga hasil kesepakatan itu adalah: (1) Warga desa Jambu Baru menolak segala kegiatan perkebunan kelapa sawit di desa Jambu

Baru; (2) Areal yang sudah tergarap kurang lebih 30 hektar mohon kepada PT TAL untuk mengembalikannya; (3) Apapun hasilnya perbatasan desa Jambu Baru dan Balukung tidak boleh digarap. Kesepakatan tersebut diikat dengan tandatangan para pihak yang merupakan simbolisasi warga desa Jambu Baru, perwakilan PT TAL dan diketahui oleh DPRD Batola.

Kata "mengembalikannya" pada poin dua, berarti tidak sekedar menyerahkan tanah yang digarap, melainkan mengembalikan fungsi lahan seperti semula. Ini berarti lahan yang telah dibumiratakan termasuk meniadakan hutan galam yang mesti ditanami kembali (reboisasi) pohon galam di areal tersebut. Dikemudian hari perjanjian ini dapat menjadi bukti kesungguhan perusahaan yang ramah ekologi apabila melakukan secara total kesepakatan yang berlaku. Sebaliknya dan semoga tidak terjadi, pihak perusahaan dapat mencari-cari berbagai alasan untuk menghindari atau pun mangkir dari perjanjian. Hal ini tentu akan menjadi catatan buruk bahkan dapat merusak niat baik semua pihak dalam perjanjian yang dilakukan di bawah naungan institusi legislatif bernama DPRD Batola.

Foto 19 Basrin Anggota DPRD Batola Membacakan Kesepakatan Bersama



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hal itu ditanggapi oleh pihak perusahaan sebagaimana berita Banuapost.net dengan judul "Jika Bersalah, PT TAL Janji Pulihkan Lahan Warga Jambu Batu" berikut ini

> Perusahaan perkebunan sawit PT Tasnida Agro Lestari (PT TAL) berjanji akan memulihkan lahan warga yang terlanjur digarap. Itu pun jika nanti dalam prosesnya terbukti bersalah menggarap lahan di luar area Hak Guna Usaha (HGU).
>
> Janji tersebut disampaikan Humas PT TAL, Subagyo dan Abdali, saat bertemu dengan perwakilan warga Jambu Baru, di ruang rapat DPRD Batola, Senin (5/8) sore.
>
> Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD, Syarif Faisal. Hadir juga anggota dewan lintas komisi, yakni Muhammad Agung Purnomo, Basuki, Ali Mansyah, Saleh, dan Basrin.
>
> "Jika memang kami terbukti salah, maka kami siap mengembalikan fungsi lahan seperti semula," imbuhnya (Rd, 2019b) .

Pasca perjanjian tersebut media online Banuapost.net pada tanggal 14 Agustus 2019 atau Sembilan hari setelah tandatangan kesepakatan menurutkan berita berjudul "Kesepakatan PT TAL – Warga Jambu Baru 'Jalan di Tempat'" bahwa:

> Nasrullah, warga Jambu Baru kepada banuapost.net, Rabu (14/8) mengatakan, pasca kesepakatan perlu ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kabupaten.
>
> Sebab, kata dia, tidak mungkin warga Jambu Baru atau perusahaan yang menjalankannya karena akan subyektif.
>
> "Meskipun kesepakatan ini dilakukan kedua belah pihak, tapi pemerintah Kabupaten perlu merealisasikannya," tandas pria yang juga dosen program studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
>
> Nasrullah mengharapkan, sebaiknya langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten, yakni dengan mengundang kedua belah PT TAL dan warga Jambu Baru untuk merumuskan dan merealisasikan kesepakatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> "Kemudian melaksanakan tahapan demi tahapan untuk penentuan batas Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Bakumpai, melalui desa Jambu Baru dan desa Balukung," ujarnya.
>
> Terpisah, Asliannoor, tokoh masyarakat setempat yang mantan kades Jambu Baru tiga periode 2000-2015 menjelaskan, setelah kesepakatan di DPRD Batola dengan pihak PT TAL, sampai saat ini tidak ada tanggapan dan realisasi dari PT TAL
>
> "Kalau sampai PT TAL tidak menepati janji, atau mengikari perjanjian yang telah disepakati. Kami tidak bisa menjamin apabila ada tindakan masyarakat yang tidak diinginkan," cetusnya.
>
> Sementara Hajarul Aswadi, anggota BPD Jambu Baru, mengatakan, terkait adanya kesepakatan kedua belah pihak, agar pemerintah desa secepat mungkin melakukan audensi ke pemerintah daerah perihal kesepakatan tersebut (Rd, 2019c).

Sebagaimana berita di atas, warga Jambu Baru menyadari jika kesepakatan dilakukan salah satu pihak akan dirasakan sangat subyektif, sehingga pemerintah Kabupaten diharapkan hadir dalam situasi tersebut, tanpa menunggu inisiatif warga. Suatu daerah yang terbuka atau membuka diri bagi kemajuan memang mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai peluang, dan juga tantangan dalam relasi warga dan pihak perusahaan termasuk dalam protes warga Jambu Baru dalam Gerakan Laung Bahenda terhadap aksi penyerobotan lahan PT TAL ini.

Pihak yang Berperan

Sampai pada bagian ini, tentu sulit menemukan sebuah gerakan sosial masyarakat yang tidak terjadi aksi anarkis, destruktif bahkan dapat berujung penahanan dari pihak keamanan. Semua itu terjadi karena keterlibatan banyak pihak yang saling memberikan dukungan sesuai porsi masing-masing. Pihak tersebut adalah kaum elit desa, wakil rakyat, dan jurnalis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Elit Desa

Upaya mengutamakan kepentingan masyarakat bagi kaum elit desa Jambu Baru terbukti dengan keterlibatan mereka secara langsung atau tidak mengakomodasi upaya warga. Dalam kondisi demikian, kaum elit desa terutama di kalangan pemerintahan desa dan BPD cenderung *saraba santuk* (serba bersinggungan) karena di satu sisi, mereka harus mengakomodasi aspirasi warga yang mengalami kesulitan. Di sisi lain, mereka harus menjaga relasi dengan pihak eksternal baik pihak pemerintah Kecamatan hingga pemerintah Kabupaten maupun pihak luar seperti perusahaan dengan baik. Pilihan terbaik adalah ikut menyalurkan aspirasi masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan pandangannya. Elit desa lain yang juga berperan adalah para tokoh masyarakat, terutama *pambakal helu* (kepala desa terdahulu), seperti Asrani menjabat sebagai kepala desa sejak 1995 hingga tahun 2000, Asliannoor sebagai kepala desa sejak tahun 2005 hingga 2015 yang terpilih selama dua periode dan satu periode pejabat sementara definitif, serta Wirdansyah kepala desa 2015 hingga sekarang. Mereka saksi hidup yang memberikan testimoni dan penjelasan ada tidaknya kesepakatan pihak pemerintah desa di era masing-masing dengan pihak perusahaan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 20 Warga dan aparat Desa Selalu Rapat untuk Menyamakan Persepsi sebelum Berangkat Dialog



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Keberadaan elit desa di tengah warga memberikan isyarat ada keberpihakan terhadap kepentingan warga desa. Hal ini menepis kecurigaan sebagaimana terjadi di daerah lain, justru elit desa yang terlibat membujuk rayu warga melepaskan tanahnya demi kepentingan perusahaan perkebunan sawit (White, 2017). Dengan demikian, warga merasa ada yang berada di tengah mereka untuk memperjuangkan apa yang telah dimiliki bersama selama ini.

Jika elit desa sedemikian solid, semestinya juga peran pihak Kecamatan dituntut untuk mengawal hal seperti ini. Sebab kejadian serupa dengan berbagai versi dapat terjadi di desa manapun, sehingga tindakan preventif (pencegahan), upaya mediasi, dan setidaknya memiliki pemahaman dalam memberikan mediasi jika terjadi konflik atau disharmonis antara warga desa dengan pihak perusahaan. Dalam Gerakan Laung Bahenda ini, pihak Kecamatan yang secara hierarki membawahi pemerintah desa Jambu Baru

Buku ini tidak diperjualbelikan.

absen dalam melihat atau mendampingi secara langsung dinamika di masyarakat dalam wilayah kerjanya. Padahal tindakan preventif dapat dilakukan dengan melihat, menyimak dan mendengarkan laporan jika ada gejolak dari masyarakat.

Wakil Rakyat untuk Rakyat

Aksi gerakan Laung Bahenda ini terjadi tidak lama setelah pemilu 2019 yang di dalamnya termasuk pemilihan anggota DPRD legislatif Batola. Ketika berlangsung aksi tersebut, tinggal dalam hitungan minggu bahkan hitungan hari saja, akan dilantik wakil rakyat periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Bahkan hari-hari tersebut beberapa wakil rakyat terpilih mendatangi kantor dewan untuk mengukur pakaian dinas. Pada saat itu, jika secara tugas maka anggota wakil rakyat memang mesti harus menerima aspirasi warga, tetapi mereka bisa juga abai karena berada di ujung masa akhir tugas mereka. Namun sesuatu yang ideal terjadi, ketika justru pimpinan DPRD Batola periode 2014 hingga 2019, Hikmatullah, mempersilahkan ruangannya, yakni ruangan pimpinan dewan di tempati sebagai tempat transit. Beberapa warga, bahkan sebagian besar warga desa jangankan masuk ke Gedung wakil rakyat, apalagi masuk ke ruang pimpinan dewan tak pernah terpikirkan sebelumnya dan hari itu mereka masuk dengan leluasa tentu merasa *shock* atau terkejut. Mungkin bayangan mereka apabila masuk ruangan akan melewati prosedur dan pertanyaan atau menyerahkan kartu identitas ternyata tidak demikian.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 21 Peserta Gerakan Laung Bahenda Diapit Dua Anggota DPRD Batola



Keterangan: Anggota DPRD paling kiri atas, yakni Saleh mengenakan peci dan mengepalkan tangan, kini menjadi ketua DPRD Batola periode 2019-2024. Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

"Semestinya kalian mendatangi dewan minimal tiga bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali" kata Hikmatullah, ketua DPRD Batola periode 2014 hingga 2019. Maka selain bercakap-cakap, suguhan minuman secangkir kopi atau teh melengkapi kedekatan antara wakil rakyat dan warga itu sendiri. Tanpa disadari cara seperti ini merupakan pra kondisi yang memberikan dampak psikologis kepada warga bahwa pimpinan dewan sangat terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Maka ketika dialog pertama berlangsung, warga merasa mereka berada dalam situasi yang sangat bersahabat bersama wakil rakyat.

Selain itu, salah seorang wakil rakyat dari partai Golkar, Syarif Faisal juga menyampaikan pendapat kritis sebagai pembelajaran politik kepada warga dalam pertemuan pertama tersebut. "Sesungguhnya saat seperti inilah kalian mesti merasakan betapa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pentingnya wakil rakyat dalam menerima berbagai aspirasi. Selama ini, wakil rakyat hanya dirasa perlu menjelang pemilihan legislatif".

Secara proporsional wakil rakyat atau anggota DPRD Batola, mesti diakui telah mengakomodir kepentingan warga terkait persoalan tanah tersebut. Statemen mereka baik dalam dialog dan liputan media menunjukkan keberpihakan terhadap warga. Selain itu, dalam kesempatan dialog dan di luar acara, Basrin yang terpilih kedua kali dari partai PDIP dan Saleh anggota dewan yang terpilih dua kali dari partai Golkar dan kini menjadi ketua DPRD Batola periode 2019 hingga 2024 memberikan apresiasi atas kedatangan warga menyampaikan aspirasinya. Terlebih lagi warga yang datang berasal dari daerah pemilihan mereka atau daerah pemilihan wilayah 1 Batola. Ia telah melakukan *cross check* kepada saudaranya yang pernah puluhan tahun tinggal di desa tersebut. Ia mendapati informasi, warga Jambu Baru memang sejak dulu bekerja di kawasan yang menjadi sengketa saat ini.

Jurnalis

Media terutama media on line sangat berperan dalam melakukan liputan gerakan Laung Bahenda ini, maka peristiwa yang telah berlalu atau pasca dialog diikat kembali oleh kemunculan berita dari berbagai media tersebut. Sehingga perkembangan peristiwa selalu diikuti publik baik dari Kabupaten Batola maupun Kalimantan Selatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 22 Wawancara Juru Dialog Laung Bahenda dengan Wartawan



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

Tabel 4 Liputan Berita Gerakan Laung Bahenda

No	Nama Media	Tanggal Terbit	Judul Berita
1	Banuapost.net	17 Juli 2019	Terusik Aktivitas PT TAL, Warga Jambu Baru Ngadu ke Dewan
2	Banuapost.net	17 Juli 2019	Begini Tuntutan Warga Jambu Baru ke PT TAL
3	Jejakrekam.com	17 Juli 2019	Banyak Mudharat, DPRD Batola Pastikan Keberadaan Sawit di Evaluasi
4	Jejakrekam.com	17 Juli 2019	Jika Beraktivitas di Luar Areal, Rahmadiannor: Kami akan Panggil PT TAL
5	Jejakrekam.com	17 Juli 2019	Tolak Sawit, Pakai Laung Kuning, Warga Desa Jambu Baru Datangi DPRD Batola
6	Kalsel.prokal.co	18 Juli 2019	Terkait Aktivitas Perusahaan Sawit, Warga Mengadu ke Dewan Batola

Buku ini tidak diperjualbelikan.

7	Banjarmasin.tribunenews.com	18 Juli 2019	Tanggapi Keluhan Lahan Gambut di Allih Fungsi Perusahaan Sawit, DPRD Batola Undang Warga Jambu Baru
8	Apahabar.com	19 Juli 2019	Aktivitas PT TAL Disetop Sementara
9	Apahabar.com	22 Juli 2019	PT TAL Harus Angkat Kaki dari Jambu Baru
10	Jejakrekam.com	22 Juli 2019	Khawatir Ada Penghianat, Warga Jambu Baru Minta Desanya Tak Diusik Sawit
11	Banuapost.net	22 Juli 2019	Protes Aktivitas PT TAL, Warga Jambu Baru Kembali Datangi Dewan
12	Jejakrekam.com	25 Juli 2019	Laung Bahenda, Simbol Perlawanan Dayak Bakumpai
13	Banuapost.net	29 Juli 2019	Warga Jambu Baru Tunggu Niat Baik PT TAL
14	Abdipersadafm.co.id	5 Agustus 2019	Soal Tapal Batas, Dewan Batola Media Warga Desa Jambu Baru dengan PT TAL
15	Banuapost.net	5 Agustus 2019	Gebrak Meja Warnai Pertemuan PT TAL dengan Warga Jambu Baru
16	Apahabar.com	5 Agustus 2019	Polemik PT TAL-Warga Jambu Baru Berakhir
17	Banuapost.net	6 Agustus 2019	Jika Bersalah, PT TAL Janji Pulihkan Lahan Warga Jambu Baru
18	Jejakrekam.com	6 Agustus 2019	Adu Argumen, Warga Jambu Tetap Tolak Sawit Masuk Desa
19	Jejakrekam.com	6 Agustus 2019	Ada Tiga Kesepakatan Sementara PT TAL-Desa Jambu Baru, Ini Hasilnya!
20	Banuapost.net	14 Agustus 2019	Kesepakatan PT TAL – Warga Desa Jambu Baru 'Jalan di Tempat'

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dari tabel di atas, dapat diketahui secara intens melalui media *online* di Kalimantan Selatan memberikan liputan secara terus menerus terhadap gerakan Laung Bahenda. Liputan ini tentu saja mengisi wacana publik Batola khususnya yang selama ini terkenal dengan daerah agraris ternyata di balik semua itu ada kehadiran perkebunan Kelapa Sawit yang keberadaannya tidak diterima oleh warga Batola terutama di desa Jambu Baru.

Pemkab Batola

Apa yang terjadi melalui gerakan Laung Bahenda dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Kabupaten Batola bahwa potensi konflik baik laten dan nyata dapat terjadi akibat keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kehadiran investor dengan harapan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Batola, meningkatkan tenaga kerja lokal guna menghindari pengangguran tinggi dengan terbukanya pekerjaan sebagai buruh atau karyawan sawit, hingga saat ini masih menjadi narasi yang membutuhkan pembuktian. Namun pemerintah Batola terkait gerakan Laung Bahenda telah melakukan respon cepat melalui pernyataan wakil Bupati, Rahmadiannoor.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto 23 Peserta Laung Bahenda Bersama Wakil Bupati Batola di Halaman DPRD Batola



Foto tim dokumentasi Gerakan Laung Bahenda

> Sementara Wabup Batola, H Rahmadian Noor, sudah meminta pihak perusahaan untuk sementara menghentikan aktivitas di lahan yang diklaim, sampai persoalan titik batas desa sudah beres.
>
> "Mungkin hari ini (Rabu), Bagian Tapem (Setda Batola) sudah turun ke lapangan dalam upaya penyelesaian batas desa di sana," kata wabup (Rudy, 2019b).

Pernyataan tersebut meskipun tidak memberikan solusi secara permanen, setidaknya memberikan kelegaan bagi warga agar tanah mereka tidak terusik oleh ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun untuk selanjutnya dan saat ini masih dinantikan adalah kejelasan dari kesepakatan pihak warga dan perwakilan perusahaan sebagai telah dilakukan di kantor DPRD Batola.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 11

BELUM BAADAT

Sebagai bagian akhir dari buku ini, ada satu konsep yang terlupakan oleh orang Dayak atau jarang diingat bahkan orang Bakumpai sendiri tentang filosofi hidupnya. Dulu falsafah hidup ini sering diucapkan oleh orang tua untuk mengingatkan kepada generasi muda yakni *belum baadat* atau disebut *belum bahadat* artinya hidup harus memegang teguh adat. Meskipun jarang terucap, tetapi gerakan sosial Laung Bahenda ini adalah genealogis kultural dari penerapan falsafah *belum baadat* hal ini dapat diketahui dengan beberapa indikator yang mewujud dalam tindakan warga.

Pertama, kesadaran untuk menjaga keberadaan dan merawat *petak danum* (tanah air), terlepas ada tidaknya pihak luar yang mengambil alih lingkungan padang sebagai mata pencaharian sekaligus kelangsungan hidup generasi akan datang terus lestari. Maka seperti rumput kering yang tersulut api di musim kemarau, semangat dan militansi warga menjadi mudah terbakar ketika lahan bernama *padang* sebagai deposit harta karun yang diambil setiap tahun dengan cara *manggalam*, *malauk, mamurun* dan lain sebagainya akan diambil alih oleh pihak lain. Jika ada pertanyaan mengapa mereka masih ingin mempertahankan pekerjaan yang turun temurun tersebut, maka jawabannya adalah sebagai upaya menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan bukan berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil risiko. Dengan Bahasa pembuatan-keputusan, tingkah laku itu disebut *enggan-risiko (risk-averse);* ia meminimumkan kemungkinan subyektif dari kerugian maksimum (Scott, 2019, p. 7)

Kedua, gerakan Laung Bahenda menjadi sebuah kebanggaan warga karena mereka memproteksi diri dari tuntutan berbau kepentingan jangka pendek seperti ganti untung apalagi ditawarkan dengan ganti rugi. Sehingga gerakan ini adalah upaya merawat ekologi desa sebagai benteng terakhir lahan gambut yang masih ada di Kabupaten Batola, khususnya di Kecamatan Kuripan.

Ketiga, upaya dialogis, diskusi bahkan debat dengan sejumlah data, semakin menunjukkan *belum baadat* harus dilihat juga dengan cara mempertahankan kebenaran dengan cara intelektual.

***

Sebagai catatan penutup, Gerakan Laung Bahenda ini belum berakhir karena kesepakatan masih bersifat politis atau normatif, prinsip kepercayaan memang kunci utamanya, tetapi jika pemerintah Kabupaten jemput bola, maka perjanjian yang ditandatangani oleh pihak warga desa dan perwakilan perusahaan yang diketahui anggota DPRD Batola dapat dilanjutkan pada tindakan lebih konkret. Dari pihak warga saat ini masih bersifat defensif atau akan bereaksi apabila ada aksi dari pihak perusahaan. Namun sekitar awal Desember 2019, ada warga yang melihat citra satelit melalui google *map*, terdapat lahan yang sepertinya menjadi garapan baru di dekat lahan sengketa tersebut. Maka untuk memastikannya, puluhan warga desa Jambu Baru mendatangi lokasi tersebut pada tanggal 3 Desember 2019, ternyata pada saat bersamaan ada beberapa buah mobil Polda Kalsel juga ke lokasi. Serta terdapat papan nama bertuliskan:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

AREAL/LAHAN INI
DALAM PROSES PENYIDIKAN
DIT RESKRIMSUS POLDA KALSEL
LP/570/XI/2019/KALSEL/SPKT, TANGGAL 4 NOVEMBER 2019
SP.SIDIK/77-4/XI/2019/DIT RESKRIMSUS, TANGGAL 5 NOPEMBER 2019
DILARANG MEMASUKI AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DAN MELAKUKAN AKTIVITAS YANG DAPAT MENGUBAH AREAL INI
DIREKTORAT RESKRIMSUS POLDA KALSEL

Keesokan harinya, terbit berita di harian Banjarmasin Post, tentang aktivitas kedatangan anggota Polda Kalsel dengan judul berita "Polisi Ambil Sampel Tanah di Perusahaan" beberapa awal paragraf berita tersebut adalah:

> Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan terus melakukan penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.
>
> Terbaru, setelah melakukan proses penyelidikan, akhirnya pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel kembali menaikkan kasus Karhutla di areal dua perusahaan ke tahap penyidikan.
>
> Dua korporasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Batola yakni PT Tasnida Agro Lestari (PT TAL) di Kecamatan *Barambai* dan PT Agri Bumi Sentosa (ABS) di Kecamatan Tabukan.
>
> Bahkan untuk proses selanjutnya, pihak penyidik Ditreskrimsus Polda turun ke lapangan bersama saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni ahli kebakaran hutan dan lahan, Prof Bambang Heru Saharjo, dan Ahli Kerusakan Lingkungan, Dr Ir Basuki Wasis, Selasa (3/12) siang hingga sore.
>
> Awalnya petugas mendatangi PT Tasnida Agro Lestari di desa Balukung Kecamatan *Barambai* dan desa Jambu Kecamatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Kuripan. Di lokasi ini petugas mengambil sampel tanah, arang, dan lainnya. Sampel itu diambil di lahan terbakar dan dimasukkan ke dalam plastik (Dwi, 2019). (catatan: ada kesalahan nama Kecamatan Barambai yang ditulis wartawan - sebagaimana huruf miring dari penulis - karena sebenarnya Kecamatan Bakumpai)

Berita tersebut setidaknya melegakan warga, bahwa areal itu untuk waktu tertentu tidak digunakan oleh pihak perusahaan. Namun seperti sebuah tanda baca, semua ini masih tanda "koma", belum sampai pada tanda "titik" apalagi kata "tamat". Maka sejumlah pertanyaan masih menggantung: Apakah pemerintah Kabupaten segera melakukan pembuatan batas desa? Apakah pemerintah Kabupaten dengan segala kewenangannya berupaya merealisasikan hasil kesepakatan tersebut? Apakah perusahaan benar-benar mematuhi dan menaati perjanjian kesepakatan? Apakah kemudian perusahaan ini akan berganti nama, berganti kepemilikan, orang-orang baru dalam jajarannya? Lalu kemudian memulai aktivitas seolah-olah benar baru tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan sebelumnya? Entahlah, tetapi warga harus selalu waspada. Mereka senantiasa siaga menjaga *petak danum* (tanah air) demi anak *ensu* (anak cucu) mereka, maka sewaktu-waktu mereka siap sedia mengikat kain kuning di kepala mereka kembali: Laung Bahenda.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adenansi. (2014). *Perubahan Sosial Budaya, Lingkungan Hidup serta Persepsi Masyarakat Sekitar Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan. (Studi Kasus di Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan)*. Banjabaru: Tesis Program Magister Sain Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Aditjondro, G. J. (2003). *Pola-pola Gerakan Lingkungan Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustin, D. (2019, September 29). *Payung, Simbol Perjuangan Pro Demokrasi Hong Kong*. Dipetik Desember 6, 2019, dari Republika.co.id: https://internasional.republika.co.id/berita/pyko48415/payung-simbol-perjuangan-pro-demokrasi-hong-kong

Alkaf, B. (2019a, Juli 19). *Aktivitas PT TAL Disetop Sementara*. (Syarif, Penyunting) Dipetik Januari 23, 2020, dari Apahabar.com: https://apahabar.com/2019/07/aktivitas-pt-tal-disetop-sementara/

Alkaf, B. (2019b, Juli 22). *PT TAL Harus Angkat Kaki dari Jambu Baru*. Dipetik Desember 5, 2019, dari apakabar.com: https://apahabar.com/2019/07/pt-tal-harus-angkat-kaki-dari-jambu-baru/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Anonim. (2009). *Barito Kuala dalam Angka 2009*. Marabahan: Badan Pusat Statistik.

Anonim. (2011, Pebruari 13). *Kelompok Kaos Merah dan Kaos Kuning Berdemo di Bangkok* . Dipetik Desember 6, 2019, dari voaindonesia: https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-kaos-merah-dan-kaos-kuning-berdemo-di-bangkok-116134239/89794.html

Anonim. (2015, Januari 25). *Profile Lambang Daerah*. Diambil kembali dari Pemkab Barito Kuala: http://pemkabbaritokuala.tribunnews.com/2015/01/27/lambang-daerah

Anonim. (2019a). *Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2019*. Marabahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala.

Anonim. (2019b). *Propinsi Kalimantan Selatan dalam Angka 2019*. Banjarbaru: BPS Propinsi Kalimantan Selatan.

Arifin, B. (2019, Juni 10). Babak Baru Diplomasi Sawit. *Kompas*, 6.

Asyikin. (2019a, Juli 17). *Banyak Mudharat, DPRD Batola Pastikan Keberadaan Sawit Dievaluasi*. Dipetik Desember 5, 2019, dari Jejakrekam.com: http://jejakrekam.com/2019/07/17/banyak-mudharat-dprd-batola-pastikan-keberadaan-sawit-dievaluasi/

Asyikin. (2019b, Juli 17). *Tolak Sawit, Pakai Laung Kuning, Warga Desa Jambu Baru Datangi DPRD Batola*. Dipetik Desember 5, 2019, dari Jejakrekam.com: http://jejakrekam.com/2019/07/17/tolak-sawit-pakai-laung-kuning-warga-desa-jambu-baru-datangi-dprd-batola/

Asyikin. (2019c, Agustus 6). *Adu Argumen, Warga Jambu Baru Tetap Tolak Sawit Masuk Ke Desa*. Dipetik Desember 5, 2019, dari Jejakrekam.com: http://jejakrekam.com/2019/08/06/adu-argumen-warga-jambu-baru-tetap-tolak-sawit-masuk-ke-desa/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Basri, M. C. (2020, Februari 28). Perekonomian dan Virus Korona. *Kompas*, 6.

Brata, N. T. (2012). Korelasi Budaya Perkebunan dan Fenomena "Buruh Borong" Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*(3), 280-293.

Budhi, S. (2017). Bakumpai People, Religion and Identity an Regional Autonomy Study of Communal Identity in South Kalimantan. *International Journal of Development Research*, 11427-11433.

Budhi, S. (2018). Two Window and One Rivers The Possibility of Dayak Meratus People in Capitalist Society. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 90-93.

Burke, P. (2011). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dwi. (2019, Desember 4). Polisi Ambil Sampel di Tanah Perusahaan. *Banjarmasin Post*, 12.

Geertz, C. (2016). *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

Hadi, R. (2015). *Mengungkap Peran Orang Dayak Bakumpai Memelopori Perdagangan ke Sungai Katingan*. Banjarbaru: Padma Publisher & Communication.

Husaini, A. (2019, Juli 25). *Laung Bahenda, Simbol Perlawanan Dayak Bakumpai*. Dipetik Desember 5, 2019, dari Jejakrekam.com: http://jejakrekam.com/2019/07/25/laung-bahenda-simbol-perlawanan-dayak-bakumpai/

Levang, P. (2003). *Ayo ke Tanah Sabrang Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Maring, P. (2010). *Bagaimana Kekuasaan Bekerja di Balik Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi? Sebuah Sudut Pandang Antropologi Tentang Perebutan Sumberdaya Ekologi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia (LPAKI).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Maulani, Z. (2000). *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CRDS.

Maunati, Y. (2006). *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.

Mubarak, A. (2019, Juli 18). *Terkait Aktivitas Perusahaan Sawit, Warga Mengadu ke Dewan Batola*. Dipetik Desember 5, 2019, dari ProKalsel: https://kalsel.prokal.co/read/news/25137-terkait-aktivitas-perusahaan-sawit-warga-mengadu-ke-dewan-batola.html

Nasrullah. (2007, Desember 3). Menimbang Perkebunan Kelapa Sawit di Batola. *Opini*.

Nasrullah. (2008). *Ngaju, Ngawa, Ngambu, Liwa (Analisa Strukturalisme Levi Strauss terhadap Pemikiran Orang Dayak Bakumpai di Sungai Barito)*. Yogyakarta: Tesis Pascsarjana Antropologi UGM.

Nasrullah. (2014, Juni 1). The Islamic Tradition of Bakumpai Dayak People. *Al-Bab Borneo Journal of Religious Studies*, *3*(1), 39-53.

Palupi, S. (2013, Juli 10). Pesan dari Sarapat. *Harian Kompas*, 7.

Palupi, S., Prasetyohadi, P., Pahun, C., Kusni, A. S., Sulang, K., Jenito, J., et al. (2015). *Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia Potret Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah*. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights.

Peneliti, T. (2013). *Pemetaan 5 Daerah Rawan Konflik Propinsi Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan.

Peneliti, T. (2020). *Annual Report Riset Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2019*. Pekanbaru: Scale Up.

Rd. (2019a, Agustus 5). *Gebrak Meja Warnai Pertemuan PT TAL dengan Warga Jambu Baru*. Dipetik Januari 26, 2020, dari banuanews:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

http://banuapost.net/gebrak-meja-warnai-pertemuan-pt-tal-dengan-warga-jambu-baru/

Rd. (2019b, Agustus 6). *Jika Bersalah, PT TAL Janji Pulihkan Lahan Warga Desa Jambu Baru*. Dipetik Januari 26, 2020, dari banuanews: http://banuapost.net/jika-bersalah-pt-tal-janji-pulihkan-lahan-warga-jambu-baru/

Rd. (2019c, Agustus 14). *Kesepakatan PT TAL- Warga Jambu Baru '*Jalan di Tempat*'*. Dipetik Januari 24, 2020, dari Banuapost.net: http://banuapost.net/kesepakatan-pt-tal-warga-jambu-baru-jalan-di-tempat/

Rini, K. (2005). *Tempun Petak Nana Sare: Kisah Dayak Kadori, Komunitas Peladang di Pinggiran*. Yogyakarta: InsistPress.

Rudy. (2019a, Juli 22). *Protes Aktivitas PT TAL, Warga Jambu Baru Kembali Datangi Dewan*. Dipetik Desember 5, 2019, dari banuanews: http://banuapost.net/protes-aktivitas-pt-tal-warga-jambu-baru-kembali-datangi-dewan/

Rudy. (2019b, Desember 7). *Terusik Aktivitas PT TAL, Warga Jambu Baru Ngadu ke Dewan*. Dipetik Desember 5, 2019, dari Banuanews: http://banuapost.net/terusik-aktivitas-pt-tal-warga-jambu-baru-ngadu-ke-dewan/

Salim, M. N. (2017). *Mereka yang Dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang* . Yogyakarta: STPN Press.

Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor.

Scott, J. C. (2019). *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Sekarwati, S. (2019, November 28). *Tempo.Co*. Dipetik Desember 6, 2019, dari Unjuk Rasa Petani di Prancis Gagal Bertemu Presiden Macron: https://dunia.tempo.co/read/1277666/unjuk-rasa-petani-di-prancis-gagal-bertemu-presiden-macron/full&view=ok

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sitoumorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sjamsuddin, H. (2001). *Pegustian dan Temenggung, Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti. Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soehada, M. (2018). *Dalam Rengkuhan Diyang Penambi Aruh dan Peladang Loksado dala Arus Perubahan*. Yogyakarta: SUKA-Press dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *10*, 1-34.

Tsing, A. L. (1998). *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan Proses Marginalisasi Pada Masyarakat Terasing*. Jakarta: Yayasan Obor.

White, B. (2017). UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa: Pertarungan Visi dan Wacana dalam Penelitian Kebijakan. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, 15-28.

Zakaria, R. Y. (2018). *Etnografi Tanah Adat Konsep-konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Bandung: Agrarian Resources Center (ARC).

Zakaria, R. Y., Pradipto, R., Iswari, P., & Wibisana, P. S. (2017). *Laporan Final Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat*. Yogyakarta: Conflict Resolution Unit, ibcsd, Karsa, Ukaid.

Zakaria, Y. (2018). *Paradoks Perlawanan Petani (Land Reform dari Bawah dan Partisipasi Petani di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BIODATA PENULIS

Nasrullah dilahirkan di desa Jambu Baru kecamatan Kuripan 26 Mei 1979. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2002, tiga tahun kemudian menempuh pendidikan S2 Antropologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Aktivitas penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, aktif menulis di media lokal, nasional dan artikelnya ilmiah dimuat pada beberapa jurnal ilmiah nasional.

Adapun buku ini adalah buku ketujuh yang ditulis sendiri maupun bersama. Selain itu akan terbit dua buah buku lagi tulisan bersama tentang Dayak Meratus dan Biografi Anang Ardiansyah, Maestro Lagu Banjar.

Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi Dayak, seperti pengurus Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) Pusat, Pengurus Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional Kalsel, dan menjadi dewan pakar pada Dewan Adat Dayak (DAD) Kalsel hingga tahun 2021.

Komunikasi bisa melalui e-mail: eje_jela@yahoo.com, atau: nasrullah@ulm.ac.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

GERAKAN LAUNG BAHENDA

Militansi Orang Dayak Bakumpai Mempertahankan Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan









"Kehadiran sebuah buku bukan hanya sebagai karya akademik, tetapi ia hadir sekaligus sebagai warisan peradaban. Buku karya saudara Nasrullah ini memotret episode peradaban dinamis dan progresif dari sub etnis Dayak Kalimantan (Bakumpai), sebuah perlawanan cerdas, bergerak dengan simbol kultural Laung Bahenda. Simbol perlawanan dan kehendak kolektif akar rumput, rasa satu desa (*ije lebu*) dan satu etnis (*uluh itah*) untuk menolak kuasa yang rusak lingkungan desa. Menariknya saudara Nasrullah tidak hanya menulis sebagai akademisi, tapi ia juga terlibat dalam gerakan tersebut, karenanya pantas disebut intelektual. Sebab intelektual itu mereka yang melibatkan diri dalam perjuangan, dalam urusan kepentingan orang banyak. Buku ini layak dan patut dibaca oleh siapapun, apalagi bagi mereka yang concern dengan isu *social advocation* dan *new social movement*."

– **Ubedilah Badrun**, *Analis Sosial Politik UNJ dan Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia/ APPSANTI.*

Buku ini tidak diperjualbelikan

ISBN 978-602-5963-80-3

PENERBIT & PERCETAKAN
ARTI BUMI INTARAN

9 786025 963803